

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- a) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan saldo anggaran lebih awal dan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang diperbandingkan dengan perubahan SAL pada periode sebelumnya;
- c) Neraca menyajikan aset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya;
- d) Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban operasional tahun berjalan yang diperbandingkan dengan pendapatan dan beban operasional periode sebelumnya;
- e) Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya
- f) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan posisi ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam memahami Laporan Keuangan maka dibuat catatan atas laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat selama satu periode tahun anggaran 2023.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2023).Yaitu membandingkan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui Sisa Perhitungan Tahun Anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- e. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- o. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan
- p. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- q. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang memadai bagi pembaca laporan keuangan dalam menelaah data kuantitatif yang disajikan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, selain pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, Catatan atas Laporan Keuangan juga meliputi gambaran ekonomi makro secara regional yang digunakan dalam membuat kebijakan keuangan dan merealisasikan kinerja dari alokasi anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menguraikan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan disertai pengungkapan yang cukup atas pos-pos laporan keuangan. Terakhir juga diungkapkan informasi non keuangan yang mempengaruhi interpretasi penyajian laporan keuangan.

Secara rinci sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun per bab mencakup:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran 2023.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada beberapa kategori seperti jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

2.3. Struktur Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada PDRB Provinsi Papua Barat.

2.4. Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.5. Pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.

Bab III Ikhtisar Capaian dan Hambatan Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar capaian kinerja keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja APBD.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana).

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan sebagai berikut:

5.1. LRA

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus/Defisit
- d. Penerimaan Pembiayaan
- e. Pengeluaran Pembiayaan

5.2. LPSAL

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan SAL pada penerimaan pembiayaan awal
- c. Saldo anggaran lebih akhir

5.3. Neraca

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

5.4. LO

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan operasional
- b. Beban operasional
- c. Surplus/defisit operasional

5.5. LAK

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Arus kas aktivitas operasi
- b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan
- c. Arus kas aktivitas pembiayaan
- d. Arus kas aktivitas non anggaran

5.6. LPE

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo ekuitas awal
- b. Surplus/defisit kegiatan operasional
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yaitu domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2024), Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan), yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 20,49%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,38%;
- c. Gini Ratio sebesar 3,8%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,47%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,18%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,94%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp61.571,37 Juta.

1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Provinsi (Ribuan Orang)	208,58	214,98	3,07%
2	Provinsi (%)	21,33	21,43	0,47%
3	Nasional (%)	9,54	9,57	0,31%
4	Peringkat Nasional	2	2	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat pada Tahun 2023 sebesar 21,43% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 21,84%. Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat masih di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	5,79	5,49	-5,18%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Tabel 1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	2,06	1,96	-4,85%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Barat Tahun 2021 adalah sebesar 5,84%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.2Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	6,80	5,84	-14,12%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	7,10	6,49	-8,59%
3	Peringkat Nasional	6	12	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 65,84%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 14,12% atau lebih kecil dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Dengan demikian TPT Provinsi Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 6,49.%.

1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2023 adalah sebesar 0,370 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Gini Ratio Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Provinsi	0,384	0,370	-3,65%
2	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,79%
3	Peringkat Nasional	6	10	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Pada Tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Papua Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,370. Angka ini turun 3,65 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,384 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Realisasi pencapaian IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2021 adalah sebesar 65,26 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Provinsi	66,72	67,47	1,12%
2	Tingkat Nasional	73,77	74,39	0,84%
3	Peringkat Nasional	32	32	

Sumber Dokumen BPS Provinsi Papua Barat

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Papua Barat adalah sebesar 67,47 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 66,72 poin mengalami kenaikan sebesar 1,12 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,79 tahun pada Tahun 2023, lebih lama dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,93 dengan harapan lama sekolah 13,34 tahun.

IPM di Provinsi Papua Barat 67,47 pada saat ini berada pada urutan 32 untuk peringkat nasional (Indonesia).

1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

No	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	87.542,00	73.933,00	73.539,00	11.710.400,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,66	(0,76)	(0,51)	5,31

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 perekonomian Provinsi Papua Barat mengalami penurunan. Pada periode Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perkonomian Provinsi Papua Barat sebesar -3,42% dan pada kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat sebesar 0,25%. Dalam skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi

Papua Barat menempati urutan 33 dari laju pertumbuhan Provinsi di wilayah Indonesia.

1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Papua Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tingkat Inflasi Provinsi Papua Barat Tahun 2021 adalah sebesar 3,47% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi	3,87	2,94	-24,03%
2	Tingkat Inflasi Nasional	3,87	2,94	-24,03%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,47%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,71% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Dengan demikian inflasi Provinsi Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam miliar rupiah

No. Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.910,36	8.331,31	8.954,29	9.067,57	9.341,54
2 Pertambangan & Penggalian	12.900,13	14.319,75	14.661,49	14.462,97	15.047,48
3 Industri Pengolahan	18.626,49	21.359,15	21.711,73	21.469,66	21.530,42
4 Pengadaan Listrik dan Gas	31,28	35,29	40,34	44,93	49,94
5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,90	81,13	88,38	91,77	96,18
6 Bangunan (Konstruksi)	11.225,99	12.254,88	13.460,97	12.624,94	12.588,55
7 Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.944,99	5.584,42	6.296,83	6.528,16	6.788,65
8 Transportasi dan Pergudangan	2.124,60	2.376,68	2.689,67	2.254,25	2.177,79
9 Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	462,92	513,00	571,03	556,79	587,56
10 Informasi dan Komunikasi	1.176,69	1.299,17	1.474,07	1.682,83	1.703,13
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	1.128,16	1.204,81	1.339,51	1.431,88	1.557,70
12 Real Estate	918,12	1.024,20	1.128,56	1.137,32	1.170,82
13 Jasa Perusahaan	83,63	91,86	98,56	95,90	95,13
14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7.635,74	8.448,09	8.916,65	9.184,66	9.252,74
15 Jasa Pendidikan	1.754,53	1.859,03	2.003,37	1.963,86	1.997,27
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	575,20	628,28	667,62	735,65	816,24
17 Jasa Lainnya	211,21	233,54	253,90	255,51	271,72
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	71.785,94	79.644,59	84.356,97	83.588,65	85.072,86
B Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	58.885,81	65.324,84	69.695,48		
C Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional	13.741.410,00	14.983.364,00	16.079.257,00		
D Peringkat Nasional	28	28	28		

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

5.2 Kebijakan Keuangan

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 tidak terdapat kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Papua Barat yang dapat berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas tahun 2023.

5.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN	-	252.000.000,00	0,00%	328.199.864.399,00	230.791.745.066,00	70,32%
2	DINAS KESEHATAN	-	-	0,00%	199.985.977.762,00	175.968.655.803,00	87,99%
3	RSUD PROVINSI PAPUA BARAT	-	-	0,00%	123.018.805.939,00	120.048.426.140,00	97,59%
4	BLUD RSUD	25.000.000.000,00	20.230.516.946,00	80,92%	25.000.000.000,00	11.100.462.998,00	44,40%
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-	0,00%	887.499.778.722,00	831.163.009.739,00	93,65%
6	SATPOL POLISI PAMONG PRAJA	-	-	0,00%	41.378.823.505,00	36.035.725.473,00	87,09%
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0,00%	21.281.911.215,00	17.258.682.934,00	81,10%
8	DINAS SOSIAL	-	-	0,00%	43.129.316.152,00	33.296.123.356,00	77,20%
9	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	150.000.000,00	109.208.400,00	72,81%	34.356.960.277,00	28.963.744.472,00	84,30%
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	0,00%	28.373.561.078,00	23.754.757.657,00	83,72%
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	0,00%	28.157.008.951,00	24.054.726.469,00	85,43%
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	-	-	0,00%	33.000.187.391,00	25.879.944.478,00	78,42%
13	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	0,00%	21.258.412.581,00	16.302.637.052,00	76,69%
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	-	-	0,00%	45.488.799.532,00	38.495.086.675,00	84,63%
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	0,00%	95.083.933.493,00	73.700.135.963,00	77,51%
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	-	-	0,00%	43.119.021.577,00	38.543.670.751,00	89,39%
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	0,00%	33.237.666.772,00	25.550.534.527,00	76,87%
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	0,00%	16.169.830.935,00	13.069.560.062,00	80,83%
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	0,00%	91.963.415.601,00	63.480.854.371,00	69,03%
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	0,00%	32.899.429.804,00	25.250.145.393,00	76,75%
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	0,00%	17.564.317.431,00	13.597.117.513,00	77,41%
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.526.010.063,00	4.590.198.997,00	101,42%	66.967.633.450,00	51.181.992.616,00	76,43%
23	BLUD KKP RAJA AMPAT	14.880.241.513,00	18.781.998.116,91	126,22%	14.880.241.513,00	12.369.823.055,82	83,13%
24	BLUD KKP KAIMANA	1.206.192.000,00	857.939.573,00	71,13%	1.206.192.000,00	428.418.011,00	35,52%
25	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	0,00%	80.310.399.464,00	62.890.049.296,00	78,31%
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	0,00%	32.718.491.838,00	23.141.878.623,00	70,73%
27	DINAS KEHUTANAN	-	-	0,00%	143.153.588.696,00	108.626.684.189,00	75,88%

NO	SKPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
28	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.350.000,00	3.450.000,00	255,56%	38.544.465.885,00	29.793.669.183,00	77,30%
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	0,00%	43.107.599.039,00	35.599.212.573,00	82,58%
30	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	0,00%	218.414.508.010,00	190.346.683.140,00	87,15%
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	0,00%	9.330.800.449,00	8.061.569.072,00	86,40%
32	BIRO HUKUM	-	-	0,00%	10.499.999.760,00	9.572.257.713,00	91,16%
33	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	0,00%	156.980.435.061,00	147.775.293.256,00	94,14%
34	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	0,00%	7.326.215.816,00	7.263.988.013,00	99,15%
35	BIRO ORGANISASI	-	-	0,00%	7.802.303.000,00	7.513.776.679,00	96,30%
36	BIRO UMUM	975.624.036,00	706.472.168,00	72,41%	36.411.481.347,00	34.853.874.966,00	95,72%
37	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	0,00%	9.499.999.921,00	9.496.669.606,00	99,96%
38	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	0,00%	12.000.000.000,00	11.943.096.086,00	99,53%
39	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	0,00%	3.999.925.158,00	3.935.749.645,00	98,40%
40	BIRO PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	-	-	0,00%	10.375.021.495,00	10.033.515.634,00	96,71%
41	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	-	-	0,00%	136.024.706.733,00	119.844.424.490,00	88,10%
42	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	-	-	0,00%	72.190.039.334,00	46.082.975.782,00	63,84%
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	0,00%	52.803.598.748,00	42.386.594.087,00	80,27%
44	BADAN PENDAPATAN DAERAH	420.740.872.306,00	447.521.105.156,00	106,37%	75.427.060.107,00	61.036.079.876,00	80,92%
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.577.818.550.868,00	3.754.586.605.185,00	82,02%	2.436.806.453.029,00	1.881.304.966.122,00	77,20%
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	0,00%	35.268.838.596,00	25.619.105.611,00	72,64%
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	0,00%	26.568.693.558,00	17.200.940.489,00	64,74%
48	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	20.531.953.681,00	13.571.059.749,00	66,10%	20.531.953.681,00	13.018.745.106,00	63,41%
49	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	0,00%	13.570.204.167,00	10.896.509.141,00	80,30%
50	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	-	-	0,00%	15.449.960.794,00	12.622.208.424,00	81,70%
51	INSPEKTORAT	-	-	0,00%	47.563.737.218,00	41.162.065.278,00	86,54%
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	0,00%	353.748.577.855,00	314.092.605.947,00	88,79%
	TOTAL	5.065.830.794.467,00	4.261.210.554.290,91	84,12%	6.379.650.148.839,00	5.216.401.168.601,82	81,77%

BAB III
IKHTISAR DAN HAMBATAN
CAPAIAN KINERJA

3.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat diklasifikasikan menurut urusan menjadi 7 (tujuh) urusan pemerintahan dan 47 (empat puluh tujuh) perangkat daerah. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan belum disajikan berdasarkan urusan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Klasifikasi Per Organisasi

NO	URUSAN/SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	(%)	LEBIH/KURANG
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.000.000.000,00	20.482.516.946,00	81,93%	(4.517.483.054,00)
1	Dinas Pendidikan	0,00	252.000.000,00	0,00%	252.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	RSUD Provinsi Papua Barat	25.000.000.000,00	20.230.516.946,00	80,92%	(4.769.483.054,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	150.000.000,00	109.208.400,00	72,81%	(40.791.600,00)
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	109.208.400,00	72,81%	(40.791.600,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	0,00
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.613.793.576,00	24.233.586.686,91	117,56%	3.619.793.110,91
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.612.443.576,00	24.230.136.686,91	117,55%	3.617.693.110,91
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.350.000,00	3.450.000,00	0,00%	2.100.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	975.624.036,00	706.472.168,00	72,41%	(269.151.868,00)
1	Sekretariat Daerah	975.624.036,00	706.472.168,00	72,41%	(269.151.868,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00%	0,00
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.019.091.376.855,00	4.215.678.770.090,00	83,99%	(803.412.606.765,00)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.577.818.550.868,00	3.754.586.605.185,00	82,02%	(823.231.945.683,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	420.740.872.306,00	447.521.105.156,00	106,37%	26.780.232.850,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.531.953.681,00	13.571.059.749,00	0,00%	(6.960.893.932,00)
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	0,00
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		5.065.830.794.467,00	4.261.210.554.290,91	84,12%	(804.620.240.176,09)

**Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Klasifikasi Per Bidang**

NO	URUSAN/SKPD	ANGGARAN		REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	LEBIH/KURANG
		SETELAH PERUBAHAN				
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.669.494.477.694,00		1.455.662.831.509,00	87,19%	(213.831.646.185,00)
1	Dinas Pendidikan	328.199.864.399,00		230.791.745.066,00	70,32%	(97.408.119.333,00)
2	Dinas Kesehatan	199.985.977.762,00		175.968.655.803,00	87,99%	(24.017.321.959,00)
3	RSUD Provinsi Papua Barat	148.018.805.939,00		131.148.889.138,00	88,60%	(16.869.916.801,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	887.499.778.722,00		831.163.009.739,00	93,65%	(56.336.768.983,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.281.911.215,00		17.258.682.934,00	81,10%	(4.023.228.281,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	41.378.823.505,00		36.035.725.473,00	87,09%	(5.343.098.032,00)
7	Dinas Sosial	43.129.316.152,00		33.296.123.356,00	77,20%	(9.833.192.796,00)
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	520.672.545.423,00		410.642.915.383,00	78,87%	(110.029.630.040,00)
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	34.356.960.277,00		28.963.744.472,00	84,30%	(5.393.215.805,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.373.561.078,00		23.754.757.657,00	83,72%	(4.618.803.421,00)
3	Dinas Ketahanan Pangan	28.157.008.951,00		24.054.726.469,00	85,43%	(4.102.282.482,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	33.000.187.391,00		25.879.944.478,00	78,42%	(7.120.242.913,00)
5	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.258.412.581,00		16.302.637.052,00	76,69%	(4.955.775.529,00)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	45.488.799.532,00		38.495.086.675,00	84,63%	(6.993.712.857,00)
7	Dinas Perhubungan	95.083.933.493,00		73.700.135.963,00	77,51%	(21.383.797.530,00)
8	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	43.119.021.577,00		38.543.670.751,00	89,39%	(4.575.350.826,00)
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	33.237.666.772,00		25.550.534.527,00	76,87%	(7.687.132.245,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	16.169.830.935,00		13.069.560.062,00	80,83%	(3.100.270.873,00)
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	91.963.415.601,00		63.480.854.371,00	69,03%	(28.482.561.230,00)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.899.429.804,00		25.250.145.393,00	76,75%	(7.649.284.411,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.564.317.431,00		13.597.117.513,00	77,41%	(3.967.199.918,00)
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	420.888.611.885,00		324.031.727.546,82	76,99%	(96.856.884.338,18)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.054.066.963,00		63.980.233.682,82	77,03%	(19.073.833.280,18)
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	80.310.399.464,00		62.890.049.296,00	78,31%	(17.420.350.168,00)
3	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	32.718.491.838,00		23.141.878.623,00	70,73%	(9.576.613.215,00)
4	Dinas Kehutanan	143.153.588.696,00		108.626.684.189,00	75,88%	(34.526.904.507,00)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.544.465.885,00		29.793.669.183,00	77,30%	(8.750.796.702,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.107.599.039,00		35.599.212.573,00	82,58%	(7.508.386.466,00)
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	690.855.436.084,00		606.723.874.082,00	87,82%	(84.131.562.002,00)
1	Sekretariat Daerah	482.640.690.017,00		440.796.473.810,00	91,33%	(41.844.216.207,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	136.024.706.733,00		119.844.424.490,00	88,10%	(16.180.282.243,00)
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	72.190.039.334,00		46.082.975.782,00	63,84%	(26.107.063.552,00)
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.676.426.762.680,00		2.064.085.148.856,00	77,12%	(612.341.613.824,00)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.803.598.748,00		42.386.594.087,00	80,27%	(10.417.004.661,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.436.806.453.029,00		1.881.304.966.122,00	77,20%	(555.501.486.907,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	75.427.060.107,00		61.036.079.876,00	80,92%	(14.390.980.231,00)
4	Badan Kepegawaian Daerah	35.268.838.596,00		25.619.105.611,00	72,64%	(9.649.732.985,00)
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47.100.647.239,00		30.219.685.595,00	64,16%	(16.880.961.644,00)
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.570.204.167,00		10.896.509.141,00	80,30%	(2.673.695.026,00)
7	Badan Penghubung Daerah	15.449.960.794,00		12.622.208.424,00	81,70%	(2.827.752.370,00)
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	47.563.737.218,00		41.162.065.278,00	86,54%	(6.401.671.940,00)
1	Inspektorat	47.563.737.218,00		41.162.065.278,00	86,54%	(6.401.671.940,00)
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	353.748.577.855,00		314.092.605.947,00	88,79%	(39.655.971.908,00)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	353.748.577.855,00		314.092.605.947,00	88,79%	(39.655.971.908,00)
TOTAL		6.379.650.148.839,00		5.216.401.168.601,82	81,77%	(1.163.248.980.237,18)

3.2. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berikut disajikan tingkat pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2023 :

1. Alokasi Pendidikan Sebesar 20%
Pada TA. 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan alokasi untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.455.226.016.838,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah sebesar Rp6.379.650.148.839,00 maka rasio alokasi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 22,81%. Alokasi tersebut diatas alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 20% untuk fungsi pendidikan. Realisasi untuk fungsi pendidikan TA. 2023 sebesar Rp1.323.617.387.047,00 atau 90,96% dari alokasi.
2. Alokasi Kesehatan Sebesar 10%
Pada TA. 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan alokasi untuk fungsi kesehatan sebesar Rp921.342.498.425,50. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp6.379.650.148.839,00 maka rasio alokasi anggaran kesehatan terhadap total belanja daerah diluar gaji adalah sebesar 15,48%. Alokasi tersebut diatas alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 10% untuk fungsi kesehatan. Realisasi untuk fungsi kesehatan pada TA. 2023 sebesar Rp842.761.653.973,50 atau 91,47% dari alokasi.
3. Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Sebesar 40%
Pada TA. 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan alokasi untuk infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.558.150.626.102,00. Apabila dibandingkan dengan belanja daerah di luar belanja bagi hasil atau transfer kepada daerah kabupaten/kota maka rasio alokasi anggaran infrastruktur adalah sebesar 40,10%. Alokasi tersebut diatas alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 40% untuk infrastruktur pelayanan publik. Realisasi untuk infrastruktur pelayanan publik pada TA. 2023 sebesar Rp2.206.326.102.069,00 atau 86,25% dari alokasi.

3.3. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Penanganan Prevalensi Stunting

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *prevalensi* berarti jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di sebuah wilayah. Sedangkan *Stunting* adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi *Prevalensi Stunting* adalah jumlah keseluruhan permasalahan *Stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Prevalensi Balita Stunting Papua Barat (Sumber SSGI 2021, 2022)

NO	NAMA WILAYAH	2021	2022	REKAPTULASI	KET
1	Kab. Pegunungan Arfak	40,1	51,5	11,4	Naik
2	Kab. Manokwari	26,9	36,6	9,7	Naik
3	Kab. Kaimana	28,5	29,2	0,7	Naik
4	Kab. Fakfak	26	29	3	Naik
5	Kab. Manokwari Selatan	28,5	27,2	-1,3	Turun
6	Kab. Teluk Wondama	31	26,1	-4,9	Turun
7	Kab. Teluk Bintuni	27,5	22,8	-4,7	Turun

(Angka Provinsi masih merupakan angka 13 Kabupaten/Kota bersama Papua Barat Daya)

Jumlah Balita Stunting Papua Barat

(Sumber EPPGBM Per November 2023, Desember 2023, Januari 2024)

Stunting	2023		2024
	November	Desember	Januari
Persentase Stunting	13,76	14,36	11,91
Jumlah Balita Stunting	2204	1.609	81
Jumlah Sasaran Balita	45.226	44.617	43.558
Data Entry	37,29%	26,02%	1,58%

(Data EPPGBM ditarik tanggal 15 Januari 2023)

Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 dengan kenaikan tertinggi ada di kabupaten Pegunungan Arfak dengan kenaikan sebesar 11,4% yaitu 40,1% menjadi 51,5%. Sedangkan penurunan Prevalensi Stunting tertinggi ada pada kabupaten Teluk Wondama dengan penurunan sebesar 4,9% yaitu dari 27,5% menjadi 22,8%.

Angka Prevalensi Stunting untuk Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh SKI (Survei Kesehatan Indonesia) atau yang dulu oleh SSGI (Survei Status Gizi Indonesia).

Berikut alokasi anggaran dan realisasi untuk penurunan *prevalensi stunting* Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023:

No.	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KATEGORI KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	OPD/ PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Pelayanan	Intervensi Spesifik	806.137.000	797.554.500	98,94%	Dinas Kesehatan

No.	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KATEGORI KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	OPD/ PENANGGUNG JAWAB
	Kesehatan Ibu dan Anak					
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Intervensi Spesifik	2.851.546.225	2.789.955.045	97,84%	Dinas Kesehatan
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Intervensi Sensitif	24.375.770.400	20.049.642.130	82,25%	Dinas PUPR
4	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Intervensi Sensitif	2.000.000.000	1.996.835.000	99,84%	Dinas PUPR
5	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Intervensi Sensitif	12.137.000.000	11.836.133.000	97,52%	Dinas PUPR
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Intervensi Sensitif	7.060.000.000	6.870.200.000	97,31%	Dinas PUPR
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Intervensi Sensitif	11.207.158.400	11.207.154.000	100,00%	Dinas PUPR
8	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Intervensi Sensitif	2.607.942.080	2.583.676.340	99,07%	Dinas Sosial
9	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Intervensi Sensitif	530.705.210	526.435.850	99,20%	Dinas Sosial
10	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Intervensi Sensitif	540.972.000	539.932.428	99,81%	DP3AKB
11	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Intervensi Sensitif	6.997.180.023	6.996.850.233	100,00%	DP3AKB

No.	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KATEGORI KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	OPD/ PENANGGUNG JAWAB
12	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Intervensi Sensitif	300.000.000	299.858.882	99,95%	Dinas Ketahanan Pangan
13	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Intervensi Sensitif	6.089.918.123	6.089.908.279	100,00%	Dinas Ketahanan Pangan
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Intervensi Sensitif	1.167.324.375	1.167.300.870	100,00%	Dinas Ketahanan Pangan
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Intervensi Sensitif	600.000.000	599.682.250	99,95%	Dinas Ketahanan Pangan
16	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Intervensi Sensitif	498.208.905	493.500.800	99,05%	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Intervensi Sensitif	6.925.617.612	6.914.002.128	99,83%	DP3AKB
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi, Publikasi, Monev	676.419.600	665.786.240	98,43%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah			87.371.899.953	82.424.407.975	94,34%	

3.4. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus

3.5.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 serta Keputusan Gubernur Nomor 973/268/12/2022 tentang Perkiraan Besaran Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 memperoleh penerimaan dalam rangka Otsus sebesar Rp.2.620.585.737.956,00 yang terdiri dari:

1. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp199.627.880.000,00;
2. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp249.534.850.000,00;
3. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp562.779.516.000,00;
4. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (Tambahan DBH Migas) sebesar Rp1.608.643.491.956 yang terdiri dari:
 1. Provinsi Papua Barat sebesar Rp488.389.486.641,00 dan;
 2. Kabupaten/Kota sebesar Rp1.120.254.005.315,00

3.5.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

3.5.3 Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran 2023.

Selama Tahun Anggaran 2023 dari alokasi pagu penerimaan dalam rangka Otsus sebesar Rp1.500.331.732.641,00 telah terealisasi sebesar Rp1.358.927.350.857,00 (90,58%) dengan capaian kinerja keluaran (output) mencapai sebesar 94,19 %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Provinsi Papua Barat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Administrasi Pemerintahan	146.113.497.133	119.627.413.331,02	81,87	85,75	
2.	Belanja Infrastruktur	5.868.569.719	5.868.569.719	100,00	100,00	
3.	Belanja Infrastruktur Air Bersih	113.535.080	113.403.600	100,00	100,00	
4.	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	36.464.923	36.464.923	100,00	100,00	
5.	Belanja Kesehatan	5.342.070.467	3.816.041.107	71,43	100,00	
6.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.753.751.326	14.338.326.161	97,18	99,85	
7.	Belanja Pendidikan	565.627.819	565.627.819	100,00	99,89	
8.	Belanja Keagamaan	11,851,229,532	11,701,241,614	98,73	100,00	
9.	Belanja Kepemudaan dan Olahraga	2,500,000,000	2,291,115,094	91,64	100,00	
10.	Belanja Pertanahan	1,949,999,055	1,949,998,000	100,00	99,94	
11.	Belanja Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan	428,940,274	428,906,274	99,99	100,00	
12.	Belanja Sosial	10,104,194,672	10,104,106,272	100,00	100,00	
	Total	199.627.880.000	170.841.213.914,02	85,47	96,06	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang telah Ditetapkan Penggunaannya						
1	Belanja Kesehatan	65.050.397.183	66.500.364.780	96,05	87,30	
2	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	108.369.349.736	100.759.573.084	92,91	85,09	
3	Belanja Pendidikan	76,115,103,081	62.481.939.692	87,37	80,59	
Total		249.534.850.000	229.741.877.556	92,04	85,09	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Tambahan Infrastruktur						
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	530.116.000	509.116.000	100.00	100.00	
2	Belanja Infrastruktur Air Bersih	8.793.980.249	8.793.980.249	100.00	100.00	
3	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	20.023.190.810	17.741.718.846	88,61	88,66	
4	Belanja Infrastruktur Perhubungan	505.526.925.896	469.744.005.086	92.92	67.15	
5	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	7,060,000,000	6,870,200,000	97.31	42.00	
6	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	20,845,303,045	19,843,513,716	95.19	100.00	
Total		562.779.516.000	523.502.533.897	93,02	67,16	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus						
1.	Pendidikan	171.097.451.154	134.478.932.768	78,60	79,00	
2.	Kesehatan	102.950.270.829	97.794.252.447	94,99	95,00	
3.	Infrastruktur	149.889.872.680	140.141.107.842	93,50	94,00	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	64.451.891.978	62.427.332.434	96,86	97,00	
Total		488.389.486.641	434.841.725.490	89,04	89,00	

Rencana dan Realisasi per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Pegawai	40.613.841.349,01	31.018.285.987,02	76,37	92,13	
2.	Belanja Barang dan Jasa	142.277.823.560,99	132.682.268.199,00	93,26	95,12	
3.	Belanja Modal	16.736.215.089,99	7.140.659.728,00	42,67	99,17	
Total		199.627.880.000,00	170.841.213.914,02	85,58	97,60	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pegawai	36.351.902.131	29.754.244.650	81,85	85,09	
2.	Belanja Barang dan Jasa	135.576.423.178	128.978.765.697	95,13	85,09	
3.	Belanja Modal	77.606.524.690	71.008.867.209	91,50	85,09	
Total		249.534.850.000	229.741.877.556	92,07	85,09	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Belanja Pegawai	7.597.185.858	4.220.395.280	55,55	67,16	
2.	Belanja Barang dan Jasa	85.538.900.284	79.575.486.252	93,03	67,16	
3.	Belanja Modal	469.643.429.858	439.706.652.365	93,63	67,15	
Total		562.779.516.000	523.502.533.897	93,02	67,16	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus						
1.	Belanja Pegawai	73.734.487.916	67.714.721.029	91,84	92,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	91.084.220.375	79.768.171.374	87,58	88,00	
3.	Belanja Modal	246.380.122.578	211.816.351.844	85,97	86,00	
4.	Belanja Hibah	77.190.655.772	75.542.481.243	97,86	98,00	
Total		488.389.486.641	434.841.725.490	89,04	89,00	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	Majelis Rakyat Papua	34.355.342.719	16,745,309,907	48,74	51,08	
2.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	30,000,000,000	30,000,000,000	100,00	100,00	
3.	Dinas PUPR	19.955.976.364	15.027.271.746	75,30	93,33	
4.	Biro Kesejahteraan Rakyat	17.576.885.736	17.426.415.918	99,14	100,00	
5.	Dinas Lingkungan Hidup	10.163.781.439	9.693.773.837	95,38	93,02	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	8.232.099.349	8.192.321.011	99,52	100,00	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.183.722.218	6.556.772.134	91,27	95,73	
Total		127.467.807.825	103.641.864.553	81,31	95,99	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Dinas Pendidikan	74,860,455,000	65,290,134,690	87.22	80.55	
2.	Dinas Kesehatan	37,287,122,026	34,718,439,095	93.11	87.08	
3.	RSUD	27,763,275,157	27,763,275,157	100.00	100	
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	22,237,159,995	18,209,834,386	81.89	84.25	
5.	Perindustrian dan Perdagangan	18,648,790,022	18,397,760,628	98.65	100.00	
6.	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	14,695,618,907	13,780,908,217	93.78	99.31	
7.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural	13,993,104,174	13,694,593,085	97.87	84.70	
Total		209,485,525,281	191,854,945,258	91.58	84.26	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	462,980,910,187	430,392,376,912	92.96	67.14	
2.	Dinas Perhubungan	58,930,111,958	55,524,924,423	94.22	89.98	
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20,023,190,810	17,741,718,846	88.61	88.66	
4.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20,845,303,045	19,843,513,716	95.19	100.00	
Total		562,779,516,000	523,502,533,897	93.02	67.16	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus						
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	149.889.872.680	140.141.107.842	93,50	94	
2.	Dinas Pendidikan	171.097.451.154	134.478.932.768	78,60	79	
3.	Dinas Kesehatan	89.893.952.252	85.915.527.382	95,57	96	
4.	Biro Kesejahteraan Rakyat	28.549.549.108	26.527.574.409	92,92	93	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.690.656.401	10.690.656.401	100	100	
6.	Majelis Rakyat Papua	15.047.944.202	15.047.944.202	100	100	
7.	RSUD Prov	13.056.318.577	11.878.725.065	90,98	91	
Total		478.225.744.374	424.680.468.069	88,80	89	

3.5.4 Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

a. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat TA. 2023 terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran.
2. Pemahaman ASN selaku pengelola dana Otsus tentang tata kelola dan tujuan Otonomi Khusus.
3. Peran serta dan partisipasi masyarakat melalui Musrembangsus dalam perencanaan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pengelolaan dana Otsus.

b. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang TA. 2023 dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPD belum menyajikan data per sumber dana.
2. Belum terintegrasi antara SIKD OTSUS dan SIPD.
3. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal.

4. Kurangnya dukungan dari OPD teknis pengelola dalam penyampaian data realisasi anggaran dan capaian keluaran/output serta dokumentasi kegiatan

c. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi antar OPD.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
3. Berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

d. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM pada OPD teknis belum sepenuhnya memadai sehingga berdampak pada perencanaan, alokasi Dana Otsus.
2. Pemisahan rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus terlambat dilaksanakan karena bergantung pada ketersediaan dana pada rekening tersebut.
3. Penggunaan 2 (dua) Sistem Informasi yang berbeda dan tidak terkoneksi (SIPD dan SIKD Otsus) menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran menjadi tidak sejalan.

Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat TA, 2023. Beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut

1. Melaksanakan sosialisasi, diklat dan FGD sebagai sarana *transfer knowledge* dan *transfer of value*, membuka ruang komunikasi lebih luas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah tidak terpisah dalam beberapa rekening, sehingga kegiatan-kegiatan prioritas yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (OAP) dapat segera dilaksanakan tanpa harus terikat dengan tahapan penyaluran dana oleh Kementerian Keuangan.
3. Laporan Tahunan Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otsus agar terpisah dengan Laporan Penggunaan DBH MIGAS OTSUS dikarenakan tahapan penyaluran berbeda, sehingga dalam penyusunan Laporan DBH MIGAS OTSUS sebagai syarat salur tidak mengalami keterlambatan.

3.5. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Yang menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan-perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik dengan dukungan oleh entitas akuntansi. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Jumlah entitas akuntansi terdiri dari 1 (satu) PPKD dan 47 (empat puluh tujuh) SKPD di lingkungan Provinsi Papua Barat yang meliputi Sekretariat Daerah beserta Biro-biro, Sekretariat Badan, Sekretariat DPR, Sekretariat MRPB, Dinas-Dinas, Badan dan Kantor.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 menerapkan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD (perlakuan akhir tahun).
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (BLUD).
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyeteroran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (khusus BLUD).
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset :

a. Persediaan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Persediaan diakui sebagai:

- a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
- b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic method*) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
- b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

b. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

f. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

g. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat dikelompokkan sebagai: utang kepada pihak ketiga; utang bunga; utang perhitungan kepada pihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang.

4.3.7 Pendapatan Lo

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).4. Pendapatan-LO dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diyakini dapat direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

4.3.8 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b. Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.9 Kapitalisasi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 67. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (capitalization thresholds) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi, dan
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan dan Jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a. Pengadaan tanah;
- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.261.210.554.290,91 atau 84,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.065.830.794.467,00, dengan rincian penerimaan pendapatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	570.472.782.580,00	570.268.533.820,91	99,96	13,38
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.493.684.360.887,00	3.689.287.962.470,00	82,10	86,58
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.673.651.000,00	1.654.058.000,00	98,83	0,04
JUMLAH		5.065.830.794.467,00	4.261.210.554.290,91	84,12	100,00

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.261.210.554.290,91 atau 54,88% dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.764.412.862.005,79, dengan rincian penerimaan pendapatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TA 2023		2022	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	570.472.782.580,00	570.268.533.820,91	620.304.274.755,79	91,93
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.493.684.360.887,00	3.689.287.962.470,00	7.138.640.580.141,00	51,68
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.673.651.000,00	1.654.058.000,00	5.468.007.109,00	30,25
JUMLAH		5.065.830.794.467,00	4.261.210.554.290,91	7.764.412.862.005,79	54,88

Penjelasan atas keseluruhan pendapatan diatas secara rinci dijelaskan berikut ini:

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp570.268.533.820,91 atau 99,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp570.472.782.580,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Pendapatan Pajak Daerah	415.066.671.306,00	442.312.292.206,00	106,56	77,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.653.534.099,00	5.410.429.565,00	95,70	0,95
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.451.453.512,00	31.551.453.512,00	100,32	5,53
4	Lain-lain PAD Yang Sah	118.301.123.663,00	90.994.358.537,91	76,92	15,96
J U M L A H		570.472.782.580,00	570.268.533.820,91	99,96	100,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mencapai 106,56% atau sebesar Rp442.312.292.206,00 merupakan pendapatan dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	107.002.890.600,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	72.851.485.900,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	199.197.121.923,00
- Pajak Air Permukaan	2.625.664.788,00
- Pajak Rokok	60.635.128.995,00
Jumlah	442.312.292.206,00

Pendapatan Retribusi Daerah mencapai 95,70% atau sebesar Rp5.410.429.565,00 diperoleh dari:

- Retribusi Jasa Umum	3.450.000,00
- Retribusi Jasa Usaha	2.877.371.165,00
- Retribusi Perizinan Tertentu	2.529.608.400,00
Jumlah	5.410.429.565,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencapai 100,32% atau Rp31.551.453.512,00 diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu

- PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	31.451.453.512,00
- PT. Papua Doberai Mandiri	100.000.000,00
Jumlah	31.551.453.512,00

Lain-lain Penerimaan PAD yang Sah mencapai 76,92% atau sebesar Rp90.994.358.537,91 diperoleh dari:

- Jasa Giro	15.369.978.517,71
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.685.414.161,97
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.810.575.473,32
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.686.876.000,00
- Pendapatan BOS/BLUD	53.441.514.384,91
JUMLAH	90.994.358.537,91

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.689.287.962.470,00 atau 82,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.493.684.360.887,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Dana Perimbangan	3.481.742.114.887,00	2.677.345.716.470,00	76,90	72,57
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	1.011.942.246.000,00	1.011.942.246.000,00	100,00	27,43
JUMLAH		4.493.684.360.887,00	3.689.287.962.470,00	82,10	100,00

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.493.684.360.887,00 atau 51,68% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.138.640.580.141,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TA 2023		2022	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	Dana Perimbangan	3.481.742.114.887,00	2.677.345.716.470,00	4.821.045.829.141,00	55,53
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	1.011.942.246.000,00	1.011.942.246.000,00	2.317.594.751.000,00	43,66
JUMLAH		4.493.684.360.887,00	3.689.287.962.470,00	7.138.640.580.141,00	51,68

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.677.345.716.470,00 atau 76,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.481.742.114.887,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.677.345.716.470,00 atau 55,33% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.821.045.829.141,00.

Realisasi tahun 2023 tersebut terdiri dari:

Dana Perimbangan	2.677.345.716.470,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.927.810.469.504,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	645.852.033.669,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.988.675.708,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	6.694.537.589,00
JUMLAH	2.677.345.716.470,00

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.011.942.246.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesarRp1.011.942.246.000,00.

Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.011.942.246.000,00 atau 43,66% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.317.594.751.000,00. Realisasi tahun 2023 tersebut terdiri dari:

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.011.942.246.000,00
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	449.162.730.000,00
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	562.779.516.000,00
JUMLAH	1.011.942.246.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp1.654.058.000,00 atau 98,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.673.651.000,00,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.654.058.000,00 atau 54,88% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.468.007.109,00. Realisasi tahun 2023 tersebut dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri yaitu PT. Jasa Raharja sebesar Rp1.654.058.000,00.

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82 atau 81,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.166.579.339.793,00, dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	BELANJA OPERASI	2.887.864.731.979,00	2.361.004.303.533,82	81,76	69,14
2	BELANJA MODAL	1.152.421.992.565,00	1.046.163.331.387,00	90,78	30,64
3	BELANJA TAK TERDUGA	126.292.615.249,00	7.535.000.000,00	5,97	0,22
JUMLAH		4.166.579.339.793,00	3.414.702.634.920,82	81,95	100,00

Realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82 atau 60,41% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.652.519.018.430,39, dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2023		2022	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	BELANJA OPERASI	2.887.864.731.979,00	2.361.004.303.533,82	3.409.368.633.901,30	69,25
2	BELANJA MODAL	1.152.421.992.565,00	1.046.163.331.387,00	2.198.753.599.029,09	47,58
3	BELANJA TAK TERDUGA	126.292.615.249,00	7.535.000.000,00	44.396.785.500,00	16,97
JUMLAH		4.166.579.339.793,00	3.414.702.634.920,82	5.652.519.018.430,39	60,41

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp2.361.004.303.533,82 atau 81,75% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.409.368.633.901,30.

NO	URAIAN	TA 2023		2022	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	Belanja Pegawai	841.706.351.638,00	523.279.966.306,39	805.254.120.293,17	64,98
2	Belanja Barang dan Jasa	1.331.719.782.551,00	1.175.581.257.267,43	1.592.404.356.670,13	73,82
3	Belanja Hibah	709.404.827.990,00	657.763.610.160,00	979.542.133.512,00	67,15
4	Belanja Bantuan Sosial	5.033.769.800,00	4.379.469.800,00	32.168.023.426,00	13,61
J U M L A H		2.887.864.731.979,00	2.361.004.303.533,82	3.409.368.633.901,30	69,25

Penjelasan masing-masing realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk gaji dan tunjangan serta honor pegawai pemerintah daerah. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp523.294.543.306,39 atau 62,17% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp841.706.351.638,00. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp523.294.543.306,39 atau 64,99% dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp805.254.120.293,17.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% DARI	
				ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	425.572.427.321,00	222.981.083.611,00	52,40	42,61
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	295.771.179.594,00	207.995.266.857,00	70,32	39,75
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.062.725.831,00	29.983.423.156,00	83,14	5,73
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.304.806.772,00	43.972.411.282,00	92,96	8,40
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	657.416.660,00	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.739.600.000,00	1.681.996.440,00	96,69	0,32
7	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	28.361.545.460,00	12.175.010.918,00	42,93	2,33
8	Belanja Pegawai BOS	420.000.000,00	-	-	-
9	Belanja Pegawai BLUD	5.816.650.000,00	4.505.351.042,39	77,46	0,86
J U M L A H		841.706.351.638,00	523.294.543.306,39	62,17	100,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri atas belanja barang atau jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Realisasi belanja tersebut dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.175.566.680.267,43 atau 88,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.331.719.782.551,00. Realisasi belanja tersebut dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.175.566.680.267,43 atau 73,82% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.592.404.356.670,13.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Barang	350.772.390.809,00	323.767.473.331,00	92,30	27,54
2	Belanja Jasa	507.438.872.061,00	436.812.102.436,00	86,08	37,16
3	Belanja Pemeliharaan	54.703.052.858,00	47.288.482.878,00	86,45	4,02
4	Belanja Perjalanan Dinas	391.067.606.508,00	338.121.305.755,00	86,46	28,76
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	700.000.000,00	207.640.200,00	29,66	0,02
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.037.860.315,00	29.369.675.667,43	108,62	2,50
J U M L A H		1.331.719.782.551,00	1.175.566.680.267,43	88,27	100,00

3. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang berupa uang tunai, barang dan atau jasa yang diberikan kepada perorangan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Uang dan barang yang diberikan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah mengeluarkan belanja hibah sebesar Rp657.763.610.160,00 atau 92,72% dari anggarannya yang ditetapkan sebesar Rp709.404.827.990,00. Belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.475.916.250,00	8.525.916.250,00	81,39%	1,30%
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	91.093.785.560,00	87.149.953.787,00	95,67%	13,25%
3	Belanja Hibah kepada BUMN	165.000.000,00	165.000.000,00		
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	605.006.448.057,00	559.682.741.824,00	92,51%	85,09%
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.663.678.123,00	2.239.998.299,00	84,09%	0,34%
Jumlah		709.404.827.990,00	657.763.610.160,00	92,72%	100,00%

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu peningkatan aktivitas kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti bantuan kepada organisasi masyarakat, organisasi adat dan agama, serta bantuan kepada nelayan. Realisasi belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.379.469.800,00,00 atau 87,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.033.769.800,00. Belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.715.300.000,00	2.303.000.000,00	84,82%	52,59%
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	100,00%	29,23%
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.038.469.800,00	796.469.800,00	76,70%	18,19%
Jumlah		5.033.769.800,00	4.379.469.800,00	87,00%	100,00%

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk biaya antara lain konstruksi dan peralatan. Belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat terserap sebesar Rp1.046.163.331.387,00 atau 90,78% dari belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp1.152.421.992.565,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.799.200.000,00	93,31%	0,27%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.961.012.205,00	147.174.589.987,00	89,76%	14,07%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.246.607.203,00	202.373.171.886,00	74,88%	19,34%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	710.699.912.646,00	691.609.472.599,00	97,31%	66,11%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.398.400.511,00	1.779.698.915,00	40,46%	0,17%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	116.060.000,00	427.198.000,00	368,08%	0,04%
Jumlah		1.152.421.992.565,00	1.046.163.331.387,00	90,78%	100,00%

Belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat terserap sebesar Rp1.046.163.331.387,00 atau 47,58% dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.198.753.599.029,09, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Tanah	2.799.200.000,00	78.415.844.534,00	3,57
2	Belanja Peralatan dan Mesin	147.174.589.987,00	156.578.703.836,09	93,99
3	Belanja Bangunan dan Gedung	202.373.171.886,00	371.948.826.301,00	54,41
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	691.609.472.599,00	1.582.081.798.122,00	43,72
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.779.698.915,00	0,00	0,00
6	Belanja Aset Lainnya	427.198.000,00	9.728.426.236,00	0,00
J U M L A H		1.046.163.331.387,00	2.198.753.599.029,09	47,58

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk mengatasi keadaan darurat. Belanja tak terduga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.535.000.000,00 atau 5,97% terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp126.292.615.249,00.

5.1.3 TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer di tahun anggaran 2023 yang besaran ditetapkan dalam surat keputusan gubernur sebesar Rp1.801.698.533.681,00 atau 81,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.213.070.809.046,00. Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	261.260.565.276,00	196.785.978.515,00	75,32%
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.951.810.243.770,00	1.604.912.555.166,00	82,23%
JUMLAH		2.213.070.809.046,00	1.801.698.533.681,00	81,41%

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	205.801.551.441,00	155.214.346.072,00	75,42%
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	55.459.013.835,00	41.571.632.443,00	74,96%
JUMLAH		261.260.565.276,00	196.785.978.515,00	75,32%

Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada tahun 2023 meliputi :

NO	BAGI HASIL	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	TW IV Okt s.d. Des 2022	900.1.14.3/43/2/2023	52.658.812.661,00	118.669.511.312,00
		TW I 2023	900.1.14.3/128/6/2023	47.952.129.620,00	
		TW III 2023	900.1.14.3/247/11/2023	18.058.569.031,00	
2	Pajak Kendaraan Bermotor	TW IV Okt s.d. Nov 2022	900.1.14.3/43/2/2023	9.366.908.400,00	25.643.201.850,00
		TW I 2023	900.1.14.3/128/6/2023	7.202.289.870,00	
		TW III 2023	900.1.14.3/247/11/2023	9.074.003.580,00	
3	Bea Balik Nama Kendaraan	TW IV Okt s.d. Nov 2022	900.1.14.3/43/2/2023	6.102.564.570,00	18.192.334.800,00
		TW I 2023	900.1.14.3/128/6/2023	6.383.954.730,00	
		TW III 2023	900.1.14.3/247/11/2023	5.705.815.500,00	
4	Pajak Rokok	TW IV 2022 Des	973/101/5/2023	8.914.472.738,00	34.280.930.553,00
		TW I Januari s.d. Maret 2023	900.1.14.3/102/5/2023	7.757.282.497,00	
		TW II 2023	900.1.14.3/175/8/2023	6.660.808.593,00	
		TW III 2023	900.1.14.3/249/11/2023	5.930.379.552,00	
		TW IV Okt s.d. Nov 2023	900.1.14.3/291/12/2023	5.017.987.173,00	
Jumlah				196.785.978.515,00	196.785.978.515,00

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Transfer Bantuan Keuangan pada tahun 2023 meliputi :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi	21.554.461.278,00	21.554.461.278,00	100,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	78.435.985.926,00	50.000.000.000,00	63,75%
3	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	1.851.819.796.566,00	1.533.358.093.888,00	82,80%
JUMLAH		1.951.810.243.770,00	1.604.912.555.166,00	82,23%

Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi adalah bantuan keuangan yang diberikan ke Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi:

NO	BANTUAN KEUANGAN	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Juni 2023	900.1.14.3/261/11/2023	9.577.302.488,00	9.577.302.488,00
2	Pajak Rokok	TW I 2023	900.1.14.3/261/11/2023	11.977.158.790,00	11.977.158.790,00
J u m l a h				21.554.461.278,00	21.554.461.278,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan yang diberikan ke Kabupaten Manokwari dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional sebesar Rp50.000.000.000,00.

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

NO	BANTUAN KEUANGAN	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	TW I 2023	900.1.14.4/76/3/2023	38.698.152.734,00	208.361.214.568,00
		TW II 2023	900.1.14.4/141/7/2023	48.372.690.917,00	
		TW III 2023	900.1.14.4/169/8/2023	67.721.767.386,00	
		TW IV 2023	900.1.14.3/248/11/2023	14.870.450.797,00	
		TW IV 2023	900.1.14.3/263/11/2023	38.698.152.734,00	
2	Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	KURANG BAYAR TAHAP III	900.1.14.4/75/3/2023	413.104.088.573,00	1.325.106.879.320,00
		TW I 2023	900.1.14.4/76/3/2023	165.000.735.468,00	
		TW II 2023	900.1.14.4/141/7/2023	206.360.919.335,00	
		TW III 2023	900.1.14.4/169/8/2023	288.751.287.070,00	
		TW IV 2023	900.1.14.3/248/11/2023	86.889.113.406,00	
		TW IV 2023	900.1.14.3/263/11/2023	165.000.735.468,00	
J u m l a h				1.533.468.093.888,00	1.533.468.093.888,00

Total realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.261.210.554.290,91 dikurangi realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82 dan realisasi transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.801.698.533.681,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp955.190.614.310,91.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp1.333.489.021.658,33.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Papua sebesar Rp0,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.333.489.021.658,33 dikurangi Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 sehingga Pembiayaan Netto per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.333.489.021.658,33.

5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp378.298.407.347,42. Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	1.338.819.354.372,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	1.333.489.021.658,33
Sub Total	5.330.332.713,71
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	378.298.407.347,42
Sub Total	383.628.740.061,13
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(4.168.277.664,00)
Lain-lain	(1.162.055.049,71)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	378.298.407.347,42

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS NERACA DAERAH

5.3.1 ASET

Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat meliputi kelompok aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan penjelasan per jenis aset di masing masing kelompok aset diuraikan berikut ini:

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang.

Aset lancar yang dimiliki meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya setelah diperhitungkan dengan Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Di muka dan Persediaan.

a. Kas di Kas Daerah **Rp325.538.508.246,79**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada pada Kas Daerah per 31 Desember 2023. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp325.538.508.246,79 atau 24,70% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.317.710.569.851,5 yang disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1	RKUD PROV. PAPUA BARAT	3000102000003	153.269.724.641,15
2	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	3000102010295	0,00
3	PAD PROVINSI PAPUA BARAT	3000102010209	222.500,00
4	REK KASDA DTI PROV. PAPUA BARAT	3000102000011	337.909.272,00
5	REK KASDA TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS PROV.PB	3000102000077	7.096.956,00
6	REK KASDA DANA OTSUS 1% PROV. PAPUA BARAT	3000102000088	113.287.293.544,00
7	REK KASDA DANA OTSUS 1,25% PROV. PAPUA BARAT	3000102000099	37.601.888.469,00
8	PENAMPUNGAN DEPOSITO PEMPROV. PAPUA BARAT	0084285953	7.460.282.488,00
9	REKENING PENAMPUNGAN PENEMPATAN DEPOSITO	035301000374309	13.574.090.376,64
10	DEPOSITO		0,00
Jumlah			325.538.508.246,79

Saldo masing-masing rekening Bank adalah berdasarkan hasil rekonsiliasi pada **Lampiran I**.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp21.909.213.151,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.659.173.246,00, koreksi lainnya Rp250.000.000,00 dan jasa giro rekening bendahara pengeluaran SKPD yang belum didebet ke kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.905,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	37.720.700,00
2	Dinas Kesehatan	0,00
3	RSUD	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	429.713,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0,00
12	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	33.316.950,00
14	Dinas Perhubungan	14.000.000,00
15	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2.636.807,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64.890.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.901.085.539,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.856.687,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00
22	BLUD PERIKANAN	0,00
23	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan	1.000.000,00
24	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	0,00
25	Dinas Kehutanan	0,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00
28	Sekretariat Daerah	0,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
29	Biro Umum	0,00
30	Biro Administrasi Pimpinan	0,00
31	Biro Organisasi	209.760,00
32	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat	48.800,00
34	Biro Hukum	0,00
35	Biro Perekonomian	0,00
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00
37	Biro Administrasi Pembangunan	0,00
38	Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Khusus	0,00
39	Inspektorat	0,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53.592.979,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00
42	Badan Pendapatan Daerah	0,00
43	Badan Kepegawaian Daerah	0,00
44	Badan Pengembangan SDM Daerah	93.054.156,00
45	BLUD BPSDM	0,00
46	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
47	Sekretariat DPRD Papua Barat	0,00
48	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	0,00
49	Badan Penghubung Daerah	39.905,00
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	591.331.155,00
Jumlah		21.909.213.151,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 21.909.213.151,00 atau 840,90% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.605.450.371,00.

Sedangkan penyelesaian sisa kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 yang disetor Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran II** laporan keuangan ini.

Sedangkan rincian jasa giro yang belum didebet ke kas daerah sebesar Rp39.905,00 dapat dilihat pada **Lampiran III**.

c. Kas di BLUD Rp30.850.685.949,63

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan saldo kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp30.850.685.949,63 terdiri dari:

No	Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	12.456.739.302,00

No	Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah (Rp)
2	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat	11.389.971.594,63
3	Kawasan Konservasi Perairan Kaimana	429.521.562,00
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.574.453.491,00
Jumlah		30.850.685.949,63

d. Kas di Bendahara BOS Rp0,00

Kas di Bendahara BOS merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.176.713.414,00.

Mutasi kurang kas di bendahara BOS senilai Rp4.176.713.414,00 karena peralihan kewenangan SMA/SMK yang sebelumnya berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemindehan kewenangan urusan SMA/SMK di Provinsi Papua Barat telah diberlakukan sejak 1 Januari 2023 sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) 106 Tahun 2021.

Pasca urusan SMA/SMK dihapus, maka Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat kini berwenang menjalankan pengelolaan SMA/SMK khusus dan Sekolah Luar Biasa (SLB). SMA/SMK khusus antara lain SMA Taruna Kasuari Nusantara dan Sekolah Keberbakatan Olahraga Papua Barat, yang pada TA. 2024 status kepemilikannya baru menjadi sekolah negeri milik Provinsi Papua Barat. Sedangkan SLB Panca Kasih Manokwari, statusnya adalah sekolah swasta dengan kepemilikannya oleh yayasan.

e. Piutang Pajak Rp3.495.406.000,00

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.495.406.000,00 merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.138.739.000,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp356.667.000,00 dan Piutang Pendapatan Air Permukaan sebesar Rp0,00. Nilai piutang tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.287.770.600,00 atau 81,52% bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Pajak beserta penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVA**.

f. Piutang Lain-lain PAD Rp4.018.622.400,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.018.622.400,00 terdiri dari:

No	Piutang Lain-lain PAD	Jumlah (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Kendaraan Bermotor	498.213.100,00
2	Piutang Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	62.608.000,00
3	Piutang Pendapatan Operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	3.457.801.300,00
Jumlah		4.018.622.400,00

Nilai piutang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp725.341.073,92,00 atau 554,03% bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2022. Rincian Piutang Lain-lain PAD beserta penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVA**.

g. Piutang Lainnya Rp14.003.140.081,76

Saldo piutang lain-lain Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.003.140.081,76 atau 103,75% apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.497.496.258,24. Rincian Piutang Lainnya beserta penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVB**.

h. Penyisihan Piutang (Rp10.202.777.578,76)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Saldo penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.202.777.578,76 merupakan penyisihan atas Piutang Pajak sebesar Rp3.205.914.800,00 Piutang Lain-lain PAD sebesar Rp543.591.100,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp6.453.271.678,76.

i. Beban Dibayar Di Muka Rp726.708.917,01

Beban Dibayar Di Muka adalah pengeluaran kas yang terjadi mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sehingga belum dapat diakui sebagai Beban/Belanja. Saldo Belanja Dibayar Di Muka sebesar Rp726.708.917,01 dihitung berdasarkan bulan pemanfaatan barang atau jasa dari total pembayarannya, yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran IVC**.

j. Persediaan **Rp2.056.407.660.268,16**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp2.056.407.660.268,16 atau 104,67% apabila dibandingkan dengan Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.964.593.537.433,53. Nilai persediaan Rp2.056.407.660.268,16 terdiri dari persediaan barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga baik masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pemerintah pusat lainnya yang sampai 31 Desember 2023 belum diserahkan sebesar Rp 1.989.822.779.147,16. Persediaan tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga namun masih dicatat sebagai persediaan karena belum ada penyerahan dalam bentuk berita acara serah terima oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pihak terkait. Dan persediaan barang pakai habis yang tidak habis digunakan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp275.384.797,00.

Rincian perhitungan persediaan per SKPD dapat dilihat dalam **Lampiran IVD**.

2) INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi Permanen **Rp455.711.921.867,97**

Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Povinsi Papua Barat adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah atas PT. Bank Papua dan PT. Papua Doberai Mandiri. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Saldo Investasi Permanen Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp455.711.921.867,97, dengan rincian sebagai berikut :

PT. Bank Papua	Rp	430.640.000.000,00
PT. Papua Doberai Mandiri	Rp	25.071.921.867,97
Jumlah	Rp	455.711.921.867,97

Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Povinsi Papua Barat atas PT. Bank Papua sebesar Rp430.640.000.000,00 senilai 86,128 lembar saham atau 15,69% dari total modal disetor Rp2.744.678.138.942,00. Investasi permanen berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Papua diakui dan diukur dengan metode *Cost Method*, sedangkan penyertaan modal kepada PT. Papua

Doberai Mandiri diakui dan diukur dengan *Equity Method*. Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri adalah 100% dari nilai penyertaan sebesar Rp50.000.000.000,00 yang berasal dari APBD tahun anggaran 2010. Tahun 2016 penyertaan modal ke PT. Papua Doberai Mandiri bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga penyertaan modal menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00.

**PERHITUNGAN INVESTASI PERMANEN
PENYERTAAN MODAL PADA PT. PAPUA DOBERAI MANDIRI
TAHUN 2010 s.d TAHUN 2023**

TAHUN	PENYERTAAN MODAL	KERUGIAN	PENGAKUAN PENGURANGAN INVESTASI (99% x KERUGIAN)	JUMLAH SISA MODAL INVESTASI YANG DISERTAKAN
2010	49.750.000.000,00	1.068.367.744,00	1.057.684.066,56	48.692.315.933,44
2011	0,00	2.315.113.525,00	2.291.962.389,75	46.400.353.543,69
2012	0,00	2.029.292.865,00	2.008.999.936,35	44.391.353.607,34
2013	0,00	7.151.668.283,00	7.080.151.600,17	37.311.202.007,17
TOTAL AUDITED 2013	49.750.000.000,00	12.564.442.417,00	12.438.797.992,83	37.311.202.007,17
Koreksi Kerugian Tahun 2013		(742.730.078,00)	(735.302.777,22)	38.046.504.784,39
2014	0,00	4.132.479.987,00	4.091.155.187,13	33.955.349.597,26
Total Mutasi 2014	0,00	3.389.749.909,00	3.355.852.409,91	
TOTAL LKPD 2014	49.750.000.000,00	15.954.192.326,00	15.794.650.402,74	33.955.349.597,26
2015	0,00	(105.566.327,00)	(104.510.663,73)	34.059.860.260,99
TOTAL LKPD 2015	49.750.000.000,00	15.848.625.999,00	15.690.139.739,01	34.059.860.260,99
Koreksi Kerugian Tahun 2010	0,00	(198.199.893,00)	(196.217.894,07)	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2013	0,00	(608.651.515,00)	(602.564.999,85)	34.858.643.154,91
Koreksi Kerugian Tahun 2014	0,00	1.528.836.957,00	1.513.348.587,43	33.345.094.567,48
Koreksi Kerugian Tahun 2015	0,00	1.017.662.064,00	1.007.485.443,36	32.337.609.124,12
2016	10.000.000.000,00	(1.173.818.495,00)	(1.168.927.584,60)	43.506.536.708,72
Total Mutasi 2016	10.000.000.000,00	565.829.118,00	553.323.552,27	
TOTAL LKPD 2016	59.750.000.000,00	16.414.455.117,00	16.243.463.291,28	43.506.536.708,72
Koreksi Kerugian Tahun 2016	0,00	6.266.834.172,00	6.240.722.362,95	37.265.814.345,77
SETELAH KOREKSI LKPD 2016	59.750.000.000,00	22.681.289.289,00	22.484.185.654,23	37.265.814.345,77
2017	0,00	(1.204.919.906,00)	(1.199.899.406,39)	38.465.713.752,17
TOTAL LKPD 2017	59.750.000.000,00	21.476.369.383,00	21.284.286.247,83	38.465.713.752,17
Koreksi Laba 2017	0,00	560.754.800,00	558.418.321,67	37.907.295.430,50
SETELAH KOREKSI LKPD 2017	59.750.000.000,00	22.037.124.183,00	21.842.704.569,50	37.907.295.430,50
2018	0,00	(684.351.448,11)	(681.499.983,73)	38.588.795.414,23
TOTAL LKPD 2018	59.750.000.000,00	21.352.772.734,89	21.161.204.585,77	38.588.795.414,23
Koreksi Rugi 2018	0,00	56.194.506,46	55.960.362,68	38.532.835.051,55
SETELAH KOREKSI LKPD 2018	59.750.000.000,00	21.408.967.241,35	21.217.164.948,45	38.532.835.051,55
Laba 2019	0,00	(1.740.352.289,67)	(1.733.100.821,80)	40.265.935.873,35
TOTAL LKPD 2019	59.750.000.000,00	19.668.614.951,68	19.484.064.126,65	40.265.935.873,35
Koreksi Rugi 2019	0,00	2.205.868.270,32	2.196.677.152,53	38.069.258.720,82
SETELAH KOREKSI LKPD 2019	59.750.000.000,00	21.874.483.222,00	21.680.741.279,18	38.069.258.720,82
Laba 2020	0,00	(244.372.314,71)	(243.354.096,73)	38.312.612.817,55
TOTAL LKPD 2020	59.750.000.000,00	21.630.110.907,29	21.437.387.182,45	38.312.612.817,55
Koreksi Rugi 2020	0,00	1.324.234.867,71	1.318.717.222,43	36.993.895.595,12
SETELAH KOREKSI LKPD 2020	59.750.000.000,00	22.954.345.775,00	22.756.104.404,88	36.993.895.595,12
Laba 2021	0,00	137.526.155,21	136.953.129,56	36.856.942.465,56
TOTAL LKPD 2021	59.750.000.000,00	23.091.871.930,21	22.893.057.534,44	36.856.942.465,56
Koreksi 2021	0,00	1.263.307.469,79	1.258.043.688,67	35.598.898.776,89
Rugi 2022	0,00	4.929.702.143,85	4.909.161.718,25	30.689.737.058,64
Koreksi 2018-2022 100%	0,00	0,00	30.198.988,99	30.659.538.069,65
TOTAL LKPD 2022	59.750.000.000,00	29.284.881.543,85	29.090.461.930,35	30.659.538.069,65
Pengembalian Saham (dari penyertaan modal Rp50.000.000.000,00)	250.000.000,00			30.909.538.069,65
Koreksi Rugi 2022	0,00	623.954.586,15	623.954.586,15	30.285.583.483,50
Rugi 2023	0,00	4.919.242.021,60	4.919.242.021,60	25.366.341.461,90
Deviden	0,00	-	100.000.000,00	25.266.341.461,90
Koreksi BPK Karena Lebih Saji	0,00	-	194.419.593,93	25.071.921.867,97
TOTAL LKPD 2023	60.000.000.000,00	34.828.078.151,60	34.928.078.132,03	25.071.921.867,97

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 Irianto, S.H., M.Kn. tanggal 22 Desember 2018 yang menyebutkan bahwa kepemilikan saham 1% yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, sehingga total

kepemilikan saham Pemerintah Provinsi pada PT. Padoma menjadi sebesar 100%.

Dalam Laporan Perubahan Modal per 31 Desember 2023 (*Unaudited*) PT. Papua Doberai Mandiri membukukan rugi 2022 senilai Rp5.553.656.730,00 dan rugi 2023 senilai Rp4.919.242.021,60. Koreksi rugi pada tahun 2022 senilai Rp623.954.586,15 karena selisih penyajian rugi di Laporan Perubahan Modal per 31 Desember 2022 (*Unaudited*) sebesar Rp4.929.702.143,85.

Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V**.

3) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap Provinsi Papua Barat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD atau APBN melalui pembelian, pembangunan, proses kapitalisasi dan hibah dari Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Aset Tetap Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp21.655.323.346.902,10 (rincian aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran VI**) dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	20.828.005.599.181,10
Penambahan Tahun 2023	1.739.550.515.358,39
Jumlah	22.567.556.114.540,00
Pengurangan Tahun 2023	912.232.767.637,31
Saldo Per 31 Desember 2023	21.655.323.346.902,10

Aset Tetap Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.655.323.346.902,10 tersebut meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dirinci sebagai berikut:

Jenis Aset	31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	31-Des-23
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.480.430.350.381,00	7.488.170.000,00	200.000.000,00	1.487.718.520.381,00
Peralatan dan Mesin	1.626.514.764.947,16	221.089.959.074,39	27.900.943.602,00	1.819.703.780.419,46
Gedung dan Bangunan	4.222.052.611.368,48	258.348.673.305,00	281.043.014.526,39	4.199.358.270.147,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.228.397.147.714,00	1.097.966.061.139,00	176.083.735.337,92	11.150.279.473.515,10
Aset Tetap Lainnya	333.202.213.241,00	11.928.241.673,00	3.968.504.312,00	341.161.950.602,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	2.937.408.511.529,45	142.729.410.167,00	423.036.569.859,00	2.657.101.351.837,45
Jumlah	20.828.005.599.181,10	1.739.550.515.358,39	912.232.767.637,31	21.655.323.346.902,10

a. Tanah Rp1.487.718.520.381,00

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Saldo Tanah Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp1.487.718.520.381,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.480.430.350.381,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	7.488.170.000,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	200.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.487.718.520.381,00

Penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2023 sebesar Rp7.488.170.000,00 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023	2.799.200.000,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain	1.000.000.000,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	3.688.970.000,00
	TOTAL	7.488.170.000,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023 Rp2.799.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.599.200.000,00
2	Dinas Kehutanan	1.200.000.000,00
	TOTAL	2.799.200.000,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain Rp1.000.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.

3. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp3.688.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.394.070.000,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
2	Dinas Kesehatan	795.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	499.900.000,00
	TOTAL	3.688.970.000,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah tahun 2023 sebesar Rp200.000.000,00 berasal dari Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) senilai Rp200.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan karena nilai dibawah nilai kapitalisasi.

b. Peralatan dan Mesin Rp1.819.703.780.419,46

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Saldo peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.819.703.780.419,46 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.626.514.764.947,16
Penambahan Tahun 2023	Rp	221.089.959.074,39
Pengurangan Tahun 2023	Rp	27.900.943.602,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.819.703.780.419,46

Penambahan nilai peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp222.809.625.318,39 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023	142.478.711.201,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023	6.071.860.351,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain	51.250.000,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	67.409.809.127,39
5	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain	5.078.328.395,00
	TOTAL	221.089.959.074,39

pada TA 2023 terdapat mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD senilai Rp5.078.328.395,00, dengan penjelasan:

- a. Senilai Rp4.214.668.395,00 dari SKPD Biro pengadaan Barang dan Jasa ke Dinas Kesehatan berupa aset Peralatan dan mesin.
 - b. Senilai Rp20.180.000,00 dari SKPD Dinas Kesehatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berupa aset Peralatan dan mesin.
 - c. Senilai Rp46.480.000,00 dari SKPD Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa aset Peralatan dan mesin.
 - d. Senilai Rp16.400.000,00 dari SKPD Dinas Kesehatan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa aset Peralatan dan mesin.
 - e. Senilai Rp780.600.000,00 dari SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Badan Penghubung Daerah berupa aset Peralatan dan mesin.
1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023 Rp142.478.711.201,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	26.019.317.624,00
2	Dinas Kesehatan	6.836.528.973,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	49.747.156.654,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.196.352.428,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	290.275.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	231.088.945,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	2.639.507.500,00
7	Dinas Sosial	653.792.998,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	348.403.349,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	397.844.331,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	864.595.000,00
11	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.495.650.184,00
12	Dinas Perhubungan	10.369.328.885,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
13	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	5.666.820.240,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	95.315.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.997.162,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	469.697.988,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	186.577.000,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	175.750.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.044.413.000,00
20	BLUD KKP Kepulauan Raja Ampat	962.066.000,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	706.637.660,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	527.172.500,00
23	Dinas Kehutanan	4.563.456.090,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	113.045.280,00
25	Sekretariat Daerah	909.990.000,00
26	Biro Pemerintahan	225.245.830,00
27	Biro Hukum	85.860.000,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	963.500.000,00
29	Biro Perkenomian	293.610.749,00
30	Biro Organisasi	350.513.075,00
31	Biro Umum	8.745.985.000,00
32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	236.989.498,00
33	Biro Asministrasi Pimpinan	116.573.966,00
34	Biro Administrasi Pembangunan	385.099.326,00
35	Sekretariat DPRD	8.226.900,00
36	Badan Penghubung Daerah	763.275.420,00
37	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	409.713.920,00
38	Inspektorat Daerah Provinsi	221.085.900,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.304.756.847,00
40	Badan Pendapatan Daerah	4.748.473.069,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	3.083.448.909,00
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	864.372.559,00
43	Badan Penelitian dan	50.200.442,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
	Pengembangan Daerah	
	TOTAL	142.478.711.201,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023 Rp6.071.860.351,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	499.889.000,00
2	Dinas Kesehatan	450.332.000,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	1.890.927.217,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.690.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	42.600.000,00
6	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	139.137.500,00
7	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	22.000.000,00
8	Dinas Koperas, Usaha Mikro dan Menengah	6.600.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.096.880,00
10	Badan Penghubung Daerah	177.029.145,00
11	Inspektorat Daerah Provinsi	1.127.000.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	1.530.850.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	129.708.609,00
	TOTAL	6.071.860.351,00

3. Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain Rp51.250.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian.
4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yang lain Rp67.409.809.127,39 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.075.895.104,00
2	Dinas Kesehatan	3.771.802.475,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.230.571.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	279.800.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	102.993.259,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
6	Dinas Perhubungan	17.235.598.147,00
7	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	25.302.000.149,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	349.525.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.173.000.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.228.564.499,39
11	Dinas Kehutanan	64.800.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	856.245.000,00
13	Sekretariat Daerah	800.000.000,00
14	Biro Umum	997.403.000,00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	73.140.000,00
16	Biro Asministrasi Pimpinan	100.000.000,00
17	Sekretariat DPRD	973.379.000,00
18	Badan Penghubung Daerah	96.200.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	365.092.494,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	333.800.000,00
	TOTAL	67.409.809.127,39

5. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain Rp5.078.328.395,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	4.214.668.395,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	20.180.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu	46.480.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.400.000,00
5	Badan Penghubung Daerah	780.600.000,00
	TOTAL	5.078.328.395,00

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp27.900.943.602,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	2.687.275.000,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	9.648.805.610,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
3	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	7.724.445.463,00
4	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain	4.995.268.395,00
5	Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomptable	2.845.149.134,00
	TOTAL	27.900.943.602,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena D hibahkan Rp2.687.275.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	168.675.000,00	HIBAH yang dicatat dalam persediaan dan sudah diserahkan ke masyarakat
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	2.500.000.000,00	HIBAH yang dicatat dalam persediaan dan sudah diserahkan ke masyarakat
3	Biro Perkenomian	18.600.000,00	HIBAH yang dicatat dalam persediaan dan sudah diserahkan ke masyarakat
	TOTAL	2.687.275.000,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) Rp9.648.805.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	3.051.055.093,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
2	Dinas Kesehatan	105.656.600,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	576.510.368,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	337.176.750,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
6	Dinas Ketahanan Pangan	11.758.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	49.500.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
8	Dinas Perhubungan	1.123.083.293,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
9	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	17.700.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	17.447.988,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	120.192.359,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	595.951.614,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.577.033,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
14	Biro Umum	3.038.487.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71.717.332,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
16	Badan Penghubung Daerah	18.060.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
17	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	49.986.920,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	154.613.702,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
19	Badan Pendapatan Daerah	52.093.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	4.441.333,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	208.372.559,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
22	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.424.666,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
	TOTAL	9.648.805.610,00	

3. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain senilai Rp4.995.268.395,00 dari Biro Pengadaan Barang dan ke Dinas Kesehatan.
4. Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomtable Rp2.845.149.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	320.519.930,00
2	Dinas Kesehatan	143.670.000,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	1.149.220.617,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.600.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.870.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.909.880,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	1.574.000,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71.167.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	60.366.065,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
10	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.620.000,00
11	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	25.600.000,00
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah	13.835.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.800.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.482.000,00
15	Dinas Kehutanan	119.883.890,00
16	Sekretariat Daerah	120.999.000,00
17	Biro Organisasi	19.130.249,00
18	Biro Umum	7.392.668,00
19	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	20.831.000,00
20	Biro Asministrasi Pimpinan	21.332.000,00
21	Biro Administrasi Pembangunan	1.624.000,00
22	Sekretariat DPRD	88.000,00
23	Badan Penghubung Daerah	2.985.000,00
24	Inspektorat Daerah Provinsi	323.459.562,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.586.243,00
26	Badan Pendapatan Daerah	238.901.970,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	23.700.460,00
	TOTAL	2.845.149.134,00

c. Gedung dan Bangunan

Rp4.199.358.270.147,09

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, perencanaan, dan pengawasan sampai siap pakai. Saldo gedung dan bangunan Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023, senilai Rp4.199.358.270.147,09 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	4.222.052.611.368,48
Penambahan Tahun 2023	Rp	258.348.673.305,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	281.043.014.526,39
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	4.199.358.270.147,09

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp256.688.720.305,00 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023	218.095.427.017,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023	11.018.585.138,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain	5.251.973.000,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	23.982.688.150,00
	TOTAL	258.348.673.305,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023 Rp218.095.427.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	37.992.430.347,00
2	Dinas Kesehatan	84.596.241.125,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	17.437.600.508,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.702.526.111,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	281.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	9.032.989.768,00
7	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	13.191.764.131,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.591.695.000,00
9	BLUD KPP Kepulauan Raja Ampat	153.000.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	16.857.499.940,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	456.669.431,00
12	Dinas Kehutanan	15.561.179.106,00
13	Biro Umum	4.513.400.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	674.000.000,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2.032.751.550,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	2.020.680.000,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
	TOTAL	218.095.427.017,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023 Rp11.018.585.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.032.415.000,00
2	Dinas Kesehatan	248.450.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	266.759.850,00
4	Dinas Perhubungan	99.989.910,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	500.000.000,00
6	Badan Penghubung Daerah	573.963.778,00
7	Inspektorat Daerah Provinsi	243.000.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	5.054.006.600,00
	TOTAL	11.018.585.138,00

3. Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain Rp5.251.973.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp23.982.688.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.481.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.040.125.500,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	278.455.000,00
4	Dinas Kehutanan	14.179.773.650,00
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.720.900.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	5.281.934.000,00
	TOTAL	23.982.688.150,00

Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp281.043.014.526,39 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Penghapusan	193.807.738.750,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	16.613.600.431,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	3.010.333.344,00
4	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	67.611.342.001,39

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	TOTAL	281.043.014.526,39

1. Pengurangan Aset Tetap karena Penghapusan Rp193.807.738.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SK. penghapusan.
2. Pengurangan Aset Tetap karena D hibahkan senilai Rp16.613.600.431,00 yaitu terdiri dari Rp10.591.784.191,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dan Rp6.021.816.240,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan hibah yang dicatat dalam persediaan dan sudah diserahkan ke Masyarakat.

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	10.591.784.191,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.021.816.240,00
	TOTAL	16.613.600.431,00

3. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) Rp3.010.333.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	1.081.113.614,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	259.400.810,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
3	Dinas Perhubungan	26.900.180,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.700.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	162.322.740,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
6	Biro Umum	1.045.146.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	290.000.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	61.750.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
	TOTAL	3.010.333.344,00	

4. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp67.611.342.001,39 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.812.753.286,00
2	Dinas Kesehatan	9.659.688.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	25.948.973.714,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	402.276.876,00
5	Dinas Perhubungan	1.995.192.555,00
6	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2.599.979.940,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.882.186.318,00
8	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	6.616.291.772,39
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.000.000,00
10	Dinas Kehutanan	2.692.232.540,00
11	Sekretariat DPRD	3.232.000.000,00
12	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	50.900.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	19.800.000,00
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	649.067.000,00
	TOTAL	67.611.342.001,39

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**Rp11.150.279.473.515,10**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya meliputi biaya perolehan yang terdiri dari biaya konstruksi, perencanaan, dan pengawasan sampai siap pakai. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.150.279.473.515,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	10.228.397.147.714,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	1.097.966.061.139,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	176.083.735.337,92
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	11.150.279.473.515,10

Penambahan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.097.966.061.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023	678.417.708.468,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	419.548.352.671,00
	TOTAL	1.097.966.061.139,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023 Rp678.417.708.468,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	675.884.420.971,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	575.000.000,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	148.917.600,00
4	Dinas Kehutanan	849.593.897,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	959.776.000,00
	TOTAL	678.417.708.468,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp419.548.352.671,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.349.098.790,00
2	Dinas Kesehatan	8.358.618.000,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	398.299.216.000,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	402.276.876,00
5	Dinas Perhubungan	997.479.874,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.709.186.318,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	2.387.727.273,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.000.000,00
9	Dinas Kehutanan	2.294.782.540,00
10	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	50.900.000,00
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	649.067.000,00
	TOTAL	419.548.352.671,00

Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp176.083.735.337,92 karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp176.083.735.337,92 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.412.632.475,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	128.595.890.687,92
3	Dinas Ketahanan Pangan	269.800.000,00
4	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	139.137.500,00
5	Dinas Perhubungan	16.333.026.466,00
6	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	22.702.020.209,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.625.000,00
8	Dinas Kehutanan	64.800.000,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	856.245.000,00
10	Biro Umum	997.403.000,00
11	Biro Asministrasi Pimpinan	100.000.000,00
12	Sekretariat DPRD	973.379.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	345.000.000,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1.273.776.000,00
	TOTAL	176.083.735.337,92

e. Aset Tetap Lainnya **Rp341.161.950.602,00**

Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap. Aset tetap lainnya milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp341.161.950.602,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	333.202.213.241,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	11.928.241.673,00
Pengurangan Tahun 203	Rp	3.968.504.312,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	341.161.950.602,00

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp11.928.241.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023	399.475.000,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023	430.518.000,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	11.098.248.673,00
	TOTAL	11.928.241.673,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2023 Rp399.475.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023 Rp430.518.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat.
3. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp11.098.248.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.023.378.000,00
2	Inspektorat Daerah Provinsi	74.870.673,00
	TOTAL	11.098.248.673,00

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp3.968.504.312,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	1.304.972.000,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	2.663.532.312,00
	TOTAL	3.968.504.312,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) Rp1.304.972.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa barjas karena di bawah nilai Kapitalisasi.
2. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp2.663.532.312,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	429.989.818,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.778.350.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	10.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	328.900.000,00
5	Badan Penghubung Daerah	96.200.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.092.494,00
	TOTAL	2.663.532.312,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp2.657.101.351.837,45

Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.657.101.351.837,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.937.408.511.529,45
Penambahan Tahun 2023	Rp	142.729.410.167,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	423.036.569.859,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.657.101.351.837,45

Penambahan nilai KDP Tahun 2023 sebesar Rp142.729.410.167,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023	1.583.267.711,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2023	76.611.137.615,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	64.535.004.841,00
	TOTAL	142.729.410.167,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2023 Rp1.583.627.711,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2023 Rp76.611.137.615,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp64.535.004.841,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	146.900.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63.990.654.841,00
3	Dinas Kehutanan	397.450.000,00
	TOTAL	64.535.004.841,00

Pengurangan nilai KDP Tahun 2023 sebesar Rp423.036.569.859,00 karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.040.125.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	403.921.830.709,00
3	Dinas Kehutanan	14.179.773.650,00
4	Sekretariat Daerah	800.000.000,00
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.720.900.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1.373.940.000,00
	TOTAL	423.036.569.859,00

g. Akumulasi Penyusutan Rp7.874.184.441.331,01

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2022 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah

Provinsi Papua Barat menggunakan metode garis lurus.

Pada Tahun 2023 dilakukan perhitungan ulang penyusutan karena adanya perubahan masa manfaat. Perubahan tersebut karena nilai sisa masa manfaat melebihi batas maksimum masa manfaat pada kebijakan Akuntansi, khususnya pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Rincian penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat di Daftar Rekap Penyusutan Per SKPD pada **Lampiran VI C**.

Sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat di Daftar Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD pada **Lampiran VI D**.

4) ASET LAINNYA Rp616.096.197.069,18

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Sampai dengan berakhirnya tahun 2023 aset lainnya Provinsi Papua Barat sebesar Rp616.096.197.069,18. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud, Aset Kondisi Rusak Berat/Hibah, Treasury Deposit Facility (TDF) dan Aset Lain-lain (SKTJM) yang dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
	PER 31 DESEMBER 2022	TAMBAH	KURANG	PER 31 DESEMBER 2023
Aset Tidak Berwujud	22.848.514.644,00	10.152.938.915,00	323.273.000,00	32.678.180.559,00
Aset Rusak Berat/Hibah	92.928.406.093,00	197.039.738.750,00	8.059.658.000,00	281.908.486.843,00
Treasury Deposit Fund (TDF)	197.570.167.504,00	227.451.503.000,00	197.570.167.504,00	227.451.503.000,00
Aset Lain-Lain (SKTJM)	34.510.791.041,18	-	-	34.510.791.041,18
Kurang Volume (Koreksi BPK)	-	39.547.235.626,00	-	39.547.235.626,00
JUMLAH	347.857.879.282,18	474.191.416.291,00	205.953.098.504,00	616.096.197.069,18

1. Penambahan aset tidak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp10.152.938.915,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ASET TIDAK BERWUJUD	8.216.975.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat		200.000.000,00
3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		477.140.000,00

NO	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
4	Inspektorat		25.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		657.090.915,00
6	Badan Penghubung Daerah		50.133.000,00
7	BLUD KKP Kepulauan Raja Ampat		415.000.000,00
8	Biro Administrasi Pimpinan		111.600.000,00
	TOTAL		10.152.938.915,00

Pengurangan aset tidak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp323.273.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat	ASET TIDAK BERWUJUD	200.000.000
2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		73.140.000
3	Badan Penghubung Daerah		50.133.000
	TOTAL		323.273.000,00

2. Penambahan aset rusak berat/hibah Tahun 2023 sebesar Rp197.039.738.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ASET RUSAK BERAT/HIBAH	193.807.738.750,00
2	Sekretariat DPRD		3.232.000.000,00
	TOTAL		197.039.738.750,00

Pengurangan aset rusak berat/hibah Tahun 2023 sebesar Rp8.059.658.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ASET RUSAK BERAT/HIBAH	7.948.058.000,00
2	Biro Administrasi Pimpinan		111.600.000,00
	TOTAL		8.059.658.000,00

3. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility bahwa di Tahun Anggaran 2023 terdapat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dengan Treasury Deposit Facility (TDF). Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemerintah daerah dalam jumlah yang aman. Proses bisnis penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD sebagai berikut:
- Pembukaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan dari Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Transfer Umum.
 - Pengisian dana pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dilakukan dengan memindahkan dana dari RKUN ke Rekening TDF berdasarkan SP2D Nihil.
 - Pembayaran remunerasi saldo DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum dilakukan penarikan dana oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dengan Pemda).
 - Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD yang dilakukan oleh Pemda setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Rekening Treasury Deposit Facility Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp227.451.503.000,00, yang merupakan realisasi dana bagi hasil pada triwulan IV dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana	Nilai
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	12.732.644.000,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	234.981.000,00
Dana Bagi Hasil PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	49.931.540.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15%	4.618.311.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 30%	109.172.359.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Iuran Tetap	60.667.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Royalti	42.339.132.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - IIUPH	4.265.466.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - PSDH	4.096.403.000,00
Jumlah	227.451.503.000,00

4. Rekap dan Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran VII A** dan Rincian SKTJM /SPPH dapat dilihat pada **Lampiran VII B**.

5. Penambahan aset Kurang Volume Tahun 2023 sebesar Rp39.547.235.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	KURANG VOLUME	6.516.421.000,00
2	Dinas Kesehatan		839.459.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum		12.917.340.967,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		723.280.235,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja		318.614.145,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		18.156.000,00
7	Dinas Perhubungan		95.141.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah		15.657.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		211.040.090,00
10	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan		29.341.400,00
11	Dinas Kehutanan		9.321.600,00
12	Sekretariat Daerah		11.356.479.783,00
13	Biro Kesejahteraan Rakyat		249.750.000,00
14	Sekretariat DPRD		1.420.900.900,00
15	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) /TDF		4.763.290.306,00
16	Badan Kepegawaian Daerah		61.000.000,00
17	BPSDM		2.041.600,00
	TOTAL		39.547.235.626,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp247.146.043.527,00 atau 92,79% dari Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp242.738.087.099,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Kewajiban Jangka Pendek	101.117.630.451,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	146.028.413.076,00
Total		247.146.043.527,00

1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek mencakup utang yang berasal dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 terdiri dari :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Rp0,00**

Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Taperum, Askes, juga termasuk pajak pusat. Rekapitulasi Buku PFK BUD dapat dilihat pada **Lampiran VIII A** dan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PFK SKPD/BUD pada **Lampiran VIII B**.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang **Rp6.113.268.600,00**

Bagian lancar dari utang jangka panjang merupakan hutang pembelian tanah Biro Pemerintahan yang jatuh tempo di Tahun 2023 sebesar Rp6.113.268.600,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kediaman Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta Landmark papua barat	4.500.000.000,00
2	Tanah Relokasi LP Kampung Ambon	1.613.268.600,00
Jumlah		6.113.268.600,00

c. Pendapatan Diterima Di Muka **Rp586.196.782,00**

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Daerah yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp586.196.782,00.

Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran IXA**.

d. Utang Belanja **Rp94.397.090.369,00**

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang belanja ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang belanja sebesar Rp94.397.090.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD	Nilai
1	Utang Belanja Pegawai	BLUD KKP Kepulauan Raja Ampat	4.708.925.500,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Satuan Polisi Pamong Praja	248.880.000,00
3	Utang Belanja Bunga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	591.000,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	89.438.693.869,00
Total			94.397.090.369,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran IX B**.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp21.074.700,00**

Utang jangka pendek lainnya adalah utang kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.074.700,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran IXB**.

2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah Rp146.028.413.076,00 yang terdiri dari utang kepada masyarakat berdasarkan perjanjian jual beli tanah, yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Gubernur Papua Barat Arfai	19.900.000.000,00
2	Kediaman Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta Landmark papua barat	11.170.000.000,00
3	Rumah Jabatan Pimpinan DPRPB	600.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Kantor BKN Provinsi Papua Barat	4.000.000.000,00
5	Kantor Satuan Brimob Polda PB	66.500.000.000,00
6	Pembangkit Listrik	500.000.000,00
7	Balai Diklat Perhubungan PB	2.698.300.000,00
8	Tanah Jalan Masuk dan Taman Kantor Gubernur	1.072.000.000,00
9	Tanah Relokasi LP Kampung Ambon	11.886.731.400,00
10	Tanah Rumah Dinas Pejabat Polda PB	22.000.000.000,00
11	PT. Papua Doberai Mandiri	2.000.000.000,00
12	SMK Jimero Kota Sorong	1.200.000.000,00
13	Jalan Kantor Gubernur (Sowi 4)	23.156.676,00
14	Kantor DPRD Provinsi Papua Barat	3.077.625.000,00
Jumlah		146.028.413.076,00

Rincian perhitungan kewajiban jangka panjang dapat dilihat pada **Lampiran X**, berdasarkan Rekap Kesepakatan Harga Tanah Biro Pemerintahan yang dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.052.548.148.416,80 atau 103,24% dari Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.779.837.496.891,60.

5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Saldo Pendapatan – LO tahun 2023 sebesar Rp4.486.081.174.387,39 atau mengalami penurunan 43,57% dari Pendapatan – LO tahun 2022 sebesar Rp7.949.759.386.566,71 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah – LO **Rp567.687.650.917,39**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang0,00undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp567.687.650.917,39 atau mengalami penurunan 6,64% dari Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2022 sebesar Rp608.080.631.812,71 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	441.519.927.606,00	504.203.396.472,00	(62.683.468.866,00)	(12,43)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.412.283.815,00	5.339.757.627,00	72.526.188,00	1,36
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	26.632.211.490,40	32.424.194.310,00	(5.791.982.819,60)	(17,86)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	94.123.228.005,99	66.113.283.403,71	28.009.944.602,28	42,37
	JUMLAH	567.687.650.917,39	608.080.631.812,71	(40.392.980.895,32)	(6,64)

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp441.519.927.606,00 atau mengalami penurunan 12,43% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2022 sebesar Rp504.203.396.472,00.

Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	106.439.768.000,00	94.236.454.700,00	12.203.313.300,00	12,95
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	72.623.203.900,00	66.722.101.600,00	5.901.102.300,00	8,84
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	199.197.121.923,00	244.122.915.410,00	(44.925.793.487,00)	(18,40)
4	Pajak Air Permukaan - LO	2.624.704.788,00	8.628.618.480,00	(6.003.913.692,00)	(69,58)
5	Pajak Rokok - LO	60.635.128.995,00	90.493.306.282,00	(29.858.177.287,00)	(32,99)
	JUMLAH	441.519.927.606,00	504.203.396.472,00	(62.683.468.866,00)	(12,43)

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp5.412.283.815,00 atau mengalami kenaikan 1,36% dari Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp5.339.757.627,00. Rincian nilai Pendapatan Restribusi Daerah – LO tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Retribusi Jasa Umum	3.054.250,00	-	3.054.250,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.877.371.165,00	2.709.308.627,00	168.062.538,00	6,20
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.531.858.400,00	2.630.449.000,00	(98.590.600,00)	(3,75)
JUMLAH		5.412.283.815,00	5.339.757.627,00	72.526.188,00	1,36

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2023 sebesar Rp26.632.211.490,40 atau mengalami penurunan 17,86% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2022 sebesar Rp32.424.194.310,00.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2021 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	26.632.211.490,40	32.424.194.310,00	(5.791.982.819,60)	(17,86)
JUMLAH		26.632.211.490,40	32.424.194.310,00	(5.791.982.819,60)	(17,86)

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LO tahun 2023 sebesar Rp94.123.228.005,99 atau mengalami kenaikan 42,37% dari Lain-lain PAD Yang Sah - LO tahun 2022 sebesar Rp66.113.283.403,71. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2022 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	17.466.450,00	(17.466.450,00)	(100,00)
2	Jasa Giro-LO	15.322.061.743,79	13.441.782.217,92	1.880.279.525,87	13,99
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	11.521.002.303,97	13.648.551.382,92	(2.127.549.078,95)	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	6.810.575.473,32	7.114.880.595,62	(304.305.122,30)	(4,28)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.618.772.800,00	1.609.208.955,00	2.009.563.845,00	124,88
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	31.958.211,00	(31.958.211,00)	(100,00)
7	Pendapatan dari BLUD-LO	56.850.815.684,91	30.249.435.591,25	26.601.380.093,66	0,00
JUMLAH		94.123.228.005,99	66.113.283.403,71	28.009.944.602,28	42,37

2) Pendapatan Transfer – LO

Rp3.916.739.465.470,00

Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Saldo Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 sebesar Rp3.916.739.465.470,00 atau mengalami penurunan 46,61% dari Pendapatan Transfer – LO tahun 2022 sebesar Rp7.336.210.747.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.904.797.219.470,00	5.018.615.996.645,00	(2.113.818.777.175,00)	(42,12)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.011.942.246.000,00	2.317.594.751.000,00	(1.305.652.505.000,00)	(56,34)
JUMLAH		3.916.739.465.470,00	7.336.210.747.645,00	(3.419.471.282.175,00)	(46,61)

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dana Perimbangan-LO	2.904.797.219.470,00	5.018.615.996.645,00	(2.113.818.777.175,00)	(42,12)
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	10.752.040.000,00	(10.752.040.000,00)	0,00
3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	1.011.942.246.000,00	2.306.842.711.000,00	(1.294.900.465.000,00)	(56,13)
JUMLAH		3.916.739.465.470,00	7.336.210.747.645,00	(3.419.471.282.175,00)	(46,61)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO **Rp1.654.058.000,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp1.654.058.000,00 atau mengalami penurunan 69,75% dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2021 sebesar Rp5.468.007.109,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp1.654.058.000, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah	1.654.058.000,00	5.468.007.109,00	(3.813.949.109,00)	(69,75)
JUMLAH		1.654.058.000,00	5.468.007.109,00	(3.813.949.109,00)	(69,75)

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	210.313.750,00	3.818.058.109,00	(3.607.744.359,00)	(94,49)
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.443.744.250,00	1.649.949.000,00	(206.204.750,00)	(12,50)
JUMLAH		1.654.058.000,00	5.468.007.109,00	(3.813.949.109,00)	(69,75)

5.4.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban tahun 2022 sebesar Rp5.166.420.859.386,13 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Operasi Rp5.166.420.859.386,13

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Saldo Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp5.166.420.859.386,13 atau mengalami penurunan 14,06% dari Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp6.011.643.058.351,85 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	522.147.969.659,39	805.254.120.293,17	(283.106.150.633,78)	(35,16)
2	Beban Persediaan	378.577.727.148,99	684.584.778.991,51	(306.007.051.842,52)	(44,70)
3	Beban Jasa	587.833.429.660,06	475.107.836.490,64	112.725.593.169,42	23,73
4	Beban Pemeliharaan	46.928.704.878,00	35.468.070.992,00	11.460.633.886,00	32,31
5	Beban Perjalanan Dinas	336.049.206.210,00	455.514.092.790,33	(119.464.886.580,33)	(26,23)
8	Beban Hibah	577.660.825.773,00	792.749.907.016,00	(215.089.081.243,00)	(27,13)
9	Beban Bantuan Sosial	3.067.537.300,00	39.957.380.830,00	(36.889.843.530,00)	(92,32)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	883.483.521.922,24	818.349.060.460,79	65.134.461.461,45	7,96
11	Beban Penyisihan Piutang	7.468.575.321,52	(73.112.569,50)	7.541.687.891,02	(10315,17)
12	Beban Transfer	1.823.008.941.919,00	1.898.533.518.661,00	(75.524.576.742,00)	(3,98)
13	Beban Lain-lain	194.419.593,93	6.197.404.395,91	(6.002.984.801,98)	100,00
JUMLAH		5.166.420.859.386,13	6.011.643.058.351,85	(845.222.198.965,72)	(14,06)

a. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp522.147.969.659,39 atau mengalami penurunan 35,16% dari Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp805.254.120.293,17. Rincian Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	226.324.057.311,00	388.039.189.067,00	(161.715.131.756,00)	(41,67)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	203.505.719.510,00	297.479.918.543,79	(93.974.199.033,79)	(31,59)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.983.423.156,00	34.585.401.363,00	(4.601.978.207,00)	(13,31)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.972.411.282,00	44.769.075.823,00	(796.664.541,00)	(1,78)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	101.550.103,00	(101.550.103,00)	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.681.996.440,00	915.619.815,00	766.376.625,00	100,00
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	12.175.010.918,00	24.156.510.418,00	(11.981.499.500,00)	100,00
8	Beban Pegawai BOS	0,00	11.011.300.048,00	(11.011.300.048,00)	100,00
9	Beban Pegawai BLUD	4.505.351.042,39	4.195.555.112,38	309.795.930,01	100,00
JUMLAH		522.147.969.659,39	805.254.120.293,17	(283.106.150.633,78)	(35,16)

b. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp378.577.727.148,99 atau mengalami penurunan 44,70% dari Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp684.584.778.991,51. Rincian Beban Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	358.482.623.450,84	577.064.456.409,83	(218.581.832.958,99)	(37,88)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	897.000.000,00	1.213.080.090,00	(316.080.090,00)	0,00
3	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	29.328.334.047,00	(29.328.334.047,00)	0,00
4	Beban Barang Ekstra Komtable	35.000.000,00	10.193.854.482,38	(10.158.854.482,38)	(99,66)
5	Beban Barang dan Jasa BOS	207.640.200,00	47.892.724.738,91	(47.685.084.538,91)	(99,57)
6	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.955.463.498,15	18.892.329.223,39	63.134.274,76	0,33
JUMLAH		378.577.727.148,99	684.584.778.991,51	(306.007.051.842,52)	(44,70)

c. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp587.833.429.660,06 atau mengalami kenaikan 23,73% dari Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp475.107.836.490,64. Rincian Beban Jasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Jasa Kantor	356.896.995.741,06	323.102.599.551,00	33.794.396.190,06	10,46
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	11.824.861.769,00	14.252.261.322,00	(2.427.399.553,00)	(17,03)
3	Beban Sewa Tanah	104.391.892,00	594.000.000,00	(489.608.108,00)	(82,43)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	102.224.279.225,00	56.221.213.613,00	46.003.065.612,00	81,83
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	18.021.894.818,00	26.038.341.440,64	(8.016.446.622,64)	(30,79)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	52.657.354.857,00	35.759.378.665,00	16.897.976.192,00	47,25
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	641.000.000,00	(641.000.000,00)	(100,00)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	38.058.454.300,00	4.436.004.000,00	33.622.450.300,00	757,94
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.870.197.058,00	14.063.037.899,00	(6.192.840.841,00)	(44,04)
JUMLAH		587.833.429.660,06	475.107.836.490,64	112.725.593.169,42	23,73

d. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp46.928.704.878,00 atau mengalami kenaikan 32,31% dari Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp35.468.070.992,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp336.049.206.210,00 atau mengalami penurunan 26,23% dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp455.514.092.790,33.

f. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp577.660.825.773,00 atau mengalami penurunan 27,13% dari Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp792.749.907.016,00. Rincian Beban Hibah menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.525.916.250,00	2.830.161.000,00	5.695.755.250,00	201,25
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.798.521.900,00	52.990.043.973,00	(46.191.522.073,00)	(87,17)
3	Beban Hibah Uang kepada BUMD	165.000.000,00	3.495.861.925,00	(3.330.861.925,00)	(95,28)
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	559.679.389.324,00	707.071.951.958,00	(147.392.562.634,00)	(20,85)
5	Beban Hibah Dana BOS	252.000.000,00	23.698.210.037,00	(23.446.210.037,00)	(98,94)
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.239.998.299,00	2.663.678.123,00	(423.679.824,00)	(15,91)
JUMLAH		577.660.825.773,00	792.749.907.016,00	(215.089.081.243,00)	(27,13)

g. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp3.067.537.300,00 atau mengalami penurunan 92,32% dari Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp39.957.380.830,00. Rincian Beban Bantuan Sosial menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	991.067.500,00	16.684.687.640,00	(15.693.620.140,00)	(94,06)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.280.000.000,00	3.030.000.000,00	(1.750.000.000,00)	(57,76)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	796.469.800,00	12.105.829.786,00	(11.309.359.986,00)	(93,42)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	8.136.863.404,00	(8.136.863.404,00)	(100,00)
JUMLAH		3.067.537.300,00	39.957.380.830,00	(36.889.843.530,00)	(92,32)

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp883.483.521.922,24 atau mengalami kenaikan 7,96% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp818.349.060.460,79. Rincian Beban Penyusutan per KIB per SKPD dapat dilihat pada Lampiran VI C.

i. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar minus Rp7.468.575.321,52 atau mengalami penurunan 10.315,17% dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar minus Rp73.112.569,50.

j. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.823.008.941.919,00 atau mengalami penurunan 3,98% dari Saldo Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp1.898.533.518.661,00. Rincian nilai Beban Transfer tahun 2023 menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	218.096.386.753,00	282.728.709.765,00	(64.632.323.012,00)	(22,86)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	21.554.461.278,00	0,00	21.554.461.278,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	50.000.000.000,00	16.200.000.000,00	33.800.000.000,00	208,64
4	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	1.533.358.093.888,00	1.599.604.808.896,00	(66.246.715.008,00)	(4,14)
JUMLAH		1.823.008.941.919,00	1.898.533.518.661,00	(75.524.576.742,00)	(3,98)

a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Saldo Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2023 sebesar Rp218.096.386.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	125.127.176.642,00
2	Pajak Kendaraan Bermotor	29.306.312.820,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.321.966.738,00
4	Pajak Rokok	34.340.930.553,00
Jumlah		218.096.386.753,00

b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Ke Provinsi

Saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp21.554.461.278,00

c. Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00.

d. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Saldo Beban Transfer Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp1.533.468.093.888,00. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Minyak Bumi	208.361.214.568,00
2	Gas Bumi	1.325.106.879.320,00
Jumlah		1.533.468.093.888,00

5.4.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp2.999.200.000,00.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT – LO

Berdasarkan saldo Pendapatan – LO dan Beban tahun anggaran 2023 dihasilkan Defisit – LO sebesar Rp683.338.884.998,74 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pendapatan – LO	Rp	4.486.081.174.387,39
- Beban – LO	Rp	<u>5.166.420.859.386,13</u>
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp	(680.339.684.998,74)
- POS LUAR BIASA	Rp	<u>(2.999.200.000,00)</u>
DEFISIT - LO	Rp	<u>(683.338.884.998,74)</u>

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan Arus Kas dari 4 (empat) aktivitas yaitu:

1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi/*Investasi Non Keuangan*
3. Aktivitas Pendanaan/*Pembiayaan*
4. Aktivitas Transitoris/*Non Anggaran*

Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

5.5.1 Saldo Kas Pada Awal Tahun 2023

Saldo kas pada awal tahun 2023 sebesar Rp1.352.682.309.533,04 terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah	Rp 1.317.710.569.851,50
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 2.605.450.371,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp 14.326.620.735,54
- Kas di Bendahara BOS	Rp 4.176.713.414,00
- Kas Lainnya	Rp 13.862.955.161,00
Saldo kas pada awal tahun 2023	<u>Rp 1.352.682.309.533,04</u>

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas atau dana yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp90.972.717.076,09 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp 4.261.210.554.290,91
- Arus Kas Keluar	<u>Rp 4.170.237.837.214,82</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>Rp 90.972.717.076,09</u>

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/*Investasi Non Keuangan*

Arus Kas dari aktivitas investasi/*Investasi Non Keuangan* mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/*Investasi Non Keuangan* Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2023 sebesar minus Rp1.046.163.331.387,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	-
- Arus Kas Keluar	Rp	1.046.163.331.387,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	<u>(1.046.163.331.387,00)</u>

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan defisit atau surplus anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	-
- Arus Kas Keluar	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	<u>-</u>

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2023 sebesar minus Rp13.862.955.161,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	232.333.073.778,00
- Arus Kas Keluar	Rp	246.196.028.939,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	<u>(13.862.955.161,00)</u>

5.5.6 Saldo Kas Pada Akhir Tahun 2023

Saldo kas akhir tahun 2023 sebesar Rp378.298.407.347,42 dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Kas di BUD awal tahun 2023	Rp	1.352.682.309.533,04
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	90.972.717.076,09
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ <i>Investasi Non Keuangan</i>	Rp	(1.046.163.331.387,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Pembiayaan</i>	Rp	-
- Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris/ <i>Non Anggaran</i>	Rp	(13.862.955.161,00)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	<u>(969.053.569.471,91)</u>
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(4.168.277.664,00)
- Lain-Lain	Rp	(1.162.055.049,71)
Saldo kas pada akhir tahun 2023	Rp	<u>378.298.407.347,42</u>

Saldo kas akhir tahun 2023 sebesar Rp378.298.407.347,42 terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah	Rp 325.538.508.246,79
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 21.909.213.151,00
- Kas di BLUD	Rp 30.850.685.949,63
Total	<u>Rp 378.298.407.347,42</u>

5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	17.779.837.496.891,60	17.221.857.654.496,46
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(683.338.884.998,74)	1.893.719.542.714,86
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
	SKTJM/SKTHM	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
	Perhitungan Mutasi Keluar atau Masuk Aset Tetap	-	-
	Perhitungan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	-	-
	Penyesuaian Perhitungan Utang	-	-
	Koreksi Ekuitas	(43.950.463.476,04)	(1.335.739.700.319,72)
4	EKUITAS AKHIR	17.052.548.148.416,80	17.779.837.496.891,60

Penjelasan:

- Saldo awal ekuitas 2023 sebesar Rp17.779.837.496.891,60 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.
- Defisit – LO sebesar Rp683.338.884.998,74 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sehingga dilakukan koreksi mengurangi ekuitas sebesar Rp43.950.463.476,04 pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
- Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.052.548.148.416,80 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI
NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari sebagai pusat pemerintahan sejak berdirinya sebagai Provinsi Irian Jaya Barat, secara administrasi terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota. Namun setelah disahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tanggal 8 Desember 2022, secara administrasi Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 Kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Manokwari
2. Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Kaimana
5. Kabupaten Fakfak
6. Kabupaten Manokwari Selatan
7. Kabupaten Pegunungan Arfak

6.2 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional

Salah satu peraturan yang menjadi dasar kegiatan operasional dan menjalankan roda pemerintahan adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Dalam periode berjalan yaitu tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak mengalami perubahan susunan perangkat daerah masi tetap sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari;
 1. Biro Umum;
 2. Biro Administrasi Pimpinan;
 3. Biro Organisasi;
 4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 5. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 6. Biro Hukum;
 7. Biro Perekonomian;
 8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Biro Administrasi Pembangunan;
 10. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB);

- c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB);
- d. Inspektorat;
- e. Dinas, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi;
 - 5. Dinas Sosial;
 - 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - 10. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - 12. Dinas Perhubungan;
 - 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 16. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 19. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 20. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 22. Dinas Kehutanan;
 - 23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Badan, terdiri dari :
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Badan Pendapatan Daerah;
 - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 8. Badan Penghubung Daerah;
 - 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII P E N U T U P

Dalam bab penutup ini diungkapkan berupa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan disusun memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010;
2. Laporan keuangan merupakan komponen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat;
4. Realisasi pendapatan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.261.210.554.290,91 atau 84,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.065.830.794.467,00;
5. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82 atau 81,95 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.166.579.339.793,00;
6. Realisasi transfer sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.801.698.533.681,00 atau 81,41% dari anggaran transfer yang ditetapkan sebesar Rp2.213.070.809.046,00;
7. Berdasarkan realisasi total pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.261.210.554.290,91, total belanja selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82 dan total transfer selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.801.698.533.681,00 maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami defisit sebesar Rp955.190.614.310,91;
8. Dalam tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA) sebesar Rp1.333.489.021.658,33 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp1.333.489.021.658,33. Jika diperhitungkan dengan defisit sebesar Rp955.190.614.310,91, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp378.298.407.347,42;
9. Pendapatan - LO sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.486.081.174.387,39;
10. Beban Operasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.166.420.859.386,13;

11. Jumlah Pendapatan - LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.486.081.174.387,39, sedangkan total Beban Operasi selama tahun 2023 sebesar Rp5.166.420.859.386,13, sehingga terdapat Defisit - LO (Pendapatan - LO lebih kecil dari Beban Operasi) sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp680.339.684.998,74;
12. Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp2.999.200.000,00, sehingga jumlah Pos Luar Biasa adalah sebesar minus Rp2.999.200.000,00. Jika diperhitungkan dengan Defisit - LO sebelum Pos Luar Biasa maka Defisit – LO sebesar Rp683.338.884.998,74;
13. Gambaran Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah total aset Rp17.299.694.191.943,80, total kewajiban Rp247.146.043.527,00 dan total ekuitas Rp17.052.548.148.416,80;
14. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2023 menggambarkan saldo awal kas sebesar Rp1.352.682.309.533,04, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp90.972.717.076,09, arus kas bersih aktivitas investasi/investasi non keuangan sebesar minus Rp1.046.163.331.387,00, arus kas bersih aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 serta arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran sebesar minus Rp13.862.955.161,00, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar minus Rp4.168.277.664,00 dan koreksi lain-lain sebesar minus Rp1.162.055.049,71 sehingga saldo akhir kas sebesar Rp378.298.407.347,42.

Dari angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 secara umum berjalan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua Barat.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

ALI BAHAM TEMONGMERE